

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Dalam pembangunan agar dapat mencapai tujuan yang berdaya guna diperlukan pedoman pelaksanaan yang dituangkan dalam suatu perencanaan yang memuat apa yang akan dikerjakan pada waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa

Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa

Tiga hal yang mendasar yang dianggap penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu organisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yaitu: (a) Adanya penyebaran arus lalu

lintas pariwisata ke arah luar dari pusat-pusat pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan. (b) Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri. (c) Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah.

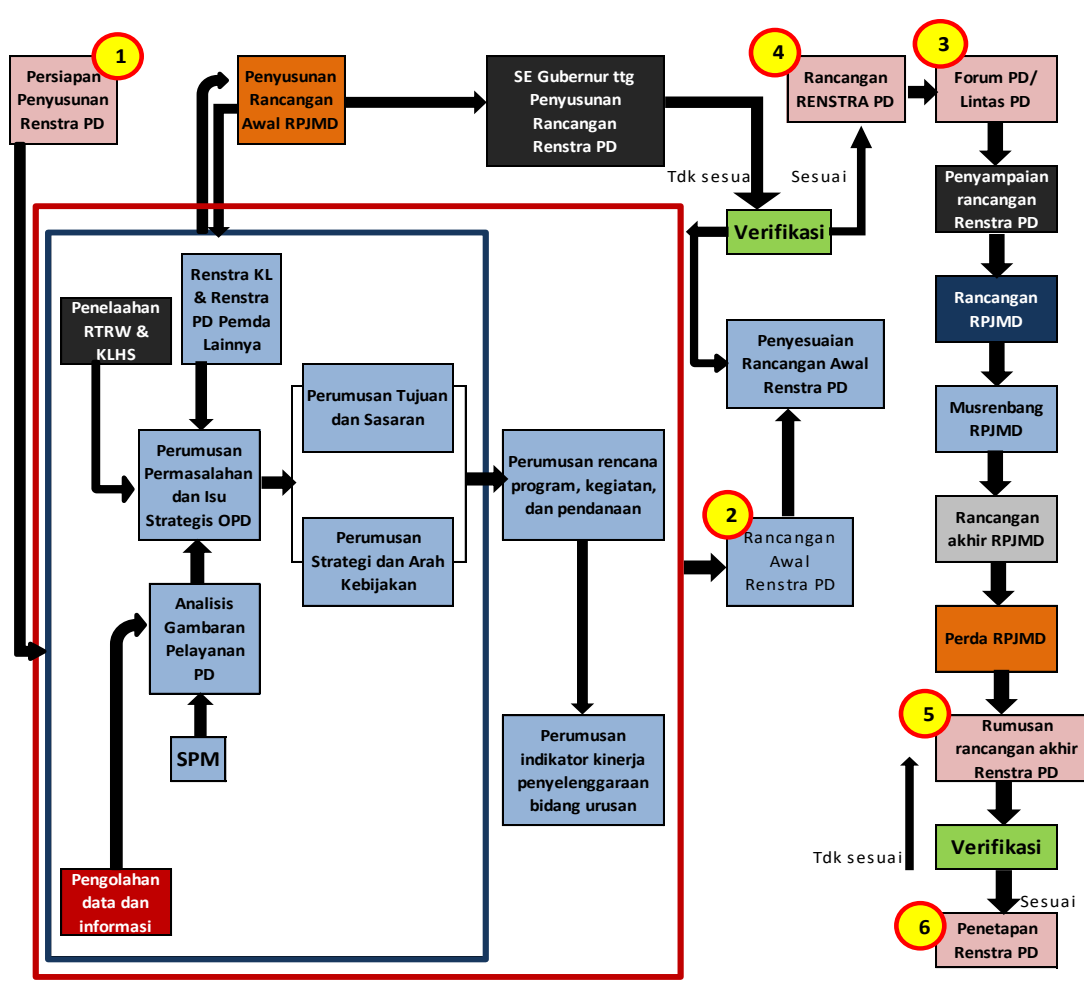
Ketiga hal tersebut mempunyai implikasi penting bagi pembangunan fisik. Selain fisik, maka koordinasi dan manajemen organisasi pariwisata sangat diperlukan demi terwujudnya pariwisata yang profesional dan bisa memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Terkadang ada destinasi pariwisata di suatu daerah yang sangat potensial, tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengelola dengan baik sehingga destinasi pariwisata tersebut akan kurang diminati oleh wisatawan. Disinilah Organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu.

Perencanaan strategis memberikan suatu gambaran komprehensif mengenai pemikiran dan tindakan aksi strategis organisasi yang akan mengarahkan kita kepada suatu pengumpulan informasi yang lebih sistematis mengenai lingkungan internal dan eksternal organisasi dan juga mengenai semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Perencanaan strategis

memfokuskan perhatian kepada isi-isu penting dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi, serta membantu mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Perencanaan stratejik membantu pengambil keputusan untuk menformulasikan dengan jelas strategi yang diinginkan dalam hal konsekuensi masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini.

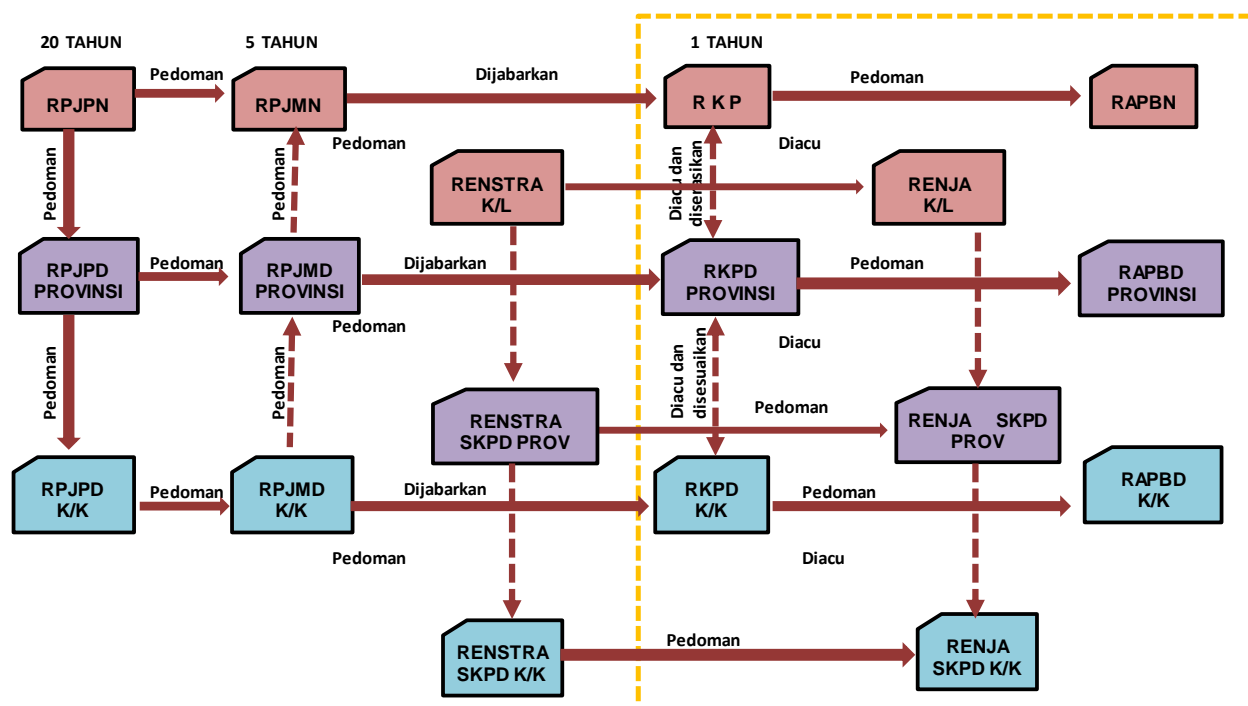
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi disusun melalui tahapan atau proses Persiapan penyusunan rancangan awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renstra-PD, Perumusan Rancangan Akhir Renstra-PD dan Penetapan Renstra-PD. Dengan adanya Renstra Disbudpar Provinsi Jambi maka upaya untuk mengukur kinerja baik ditingkat sasaran (dampak/*impact*), Program Hasil (*outcome*) dan di tingkat Kegiatan (keluaran/*output*) secara terukur dapat terlaksana.

Gambar 1.1 Tahapan penyusunan Renstra OPD



Dalam penyusunan Renstra-PD, perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra-PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Disbudpar Provinsi Jambi 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Renstra-PD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan PD.

Gambar 1.2. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra OPD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 telah menetapkan sasaran daerah

yang ingin dicapai pada tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih.

Sasaran dalam RPJMD Provinsi Jambi menjadi acuan dalam penetapan sasaran kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra dimaksud merupakan penjabaran Tupoksi, Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.

Proses penyusunan rencana strategis ini mengakomodir indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi (RPJMD). Rencana strategis ini merupakan suatu dokumen berisi uraian lebih lanjut dari visi dan misi, tujuan strategis, sasaran strategis, serta arah kebijakan tahun 2021 s.d. 2026 yang diimplementasikan dalam program kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Adapun penjelasan untuk menggambarkan hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun;

2. Rencana Strategis dengan Renstra K/L, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas

sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jambi;

3. Rencana Strategis dengan Renstra Perangkat Daerah (RPD)

Kabupaten/Kota, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran tekni RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi;

4. Rencana Strategis dengan Rencana Kerja (Renja SKPD),

Merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan idiil dalam penyusunan Renstra ini adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- c. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657); 5
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
 - g. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum;

- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2022-2024;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Penetapan Warisan Geologi (GEOHERITAGE) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah {Provinsi Jambi Nomor 15

- Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi;
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Jambi;
 - v. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 - w. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Taman Budaya Jambi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 - x. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 - y. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi;
 - z. Instruksi Gubernur Jambi No. 1 tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Jambi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan program kegiatan prioritas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Jambi tahun 2021-2026. Program dan kegiatan dalam Renstra ini merupakan implementasi dari Ripparprov Provinsi Jambi, RPJMD dan RPJP Jambi yang telah diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menyusun rencana kerja SKPD dan rencana program kegiatan strategis yang disusun oleh masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sehingga konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan dapat terjaga.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Renstra Disbudpar Provinsi Jambi) Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Gubernur Jambi yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Ripparda dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;

2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antara SKPD Provinsi, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait, dalam koridor pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi;
3. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Bidang/UPTD lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah bidang kebudayaan dan pariwisata serta pengelolaannya.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan misi strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kab/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 24 dan 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei dan Taman Budaya Jambi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok Membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Pembinaan dan pengembangan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam mendukung dan menjalankan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu (1) Museum Siginjei dan (2) Taman Budaya Jambi.

Berikut tugas dan fungsi dari pemangku jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Taman Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi:

a. Sekretariat

Tugas:

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, menganalisa, mengarahkan dalam melakukan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.

Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan program;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. mengelola surat menyurat, yang meliputi arsip dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
- b. menyiapkan perlengkapan pertemuan/rapat termasuk upacara-upacara;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- d. menyusun instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- e. menyusun dan mengelola mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, baik yang bertugas di dinas maupun UPTD;

- f. membuat rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN;
- g. menyusun rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan penjenjangan bagi ASN;
- h. mengatur penyiapan absen pegawai baik pagi maupun siang;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan disiplin;
- j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- b. mengelola urusan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai di lingkup Dinas;
- c. mengelola urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik daerah;
- d. mengelola urusan barang persediaan;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi, penerimaan, pengeluaran, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Subbagian Program

Tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan, pengelolaan dan penyajian data;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni**Tugas:**

Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan regulasi, fasilitasi, bahan-bahan dan data kelengkapan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, pelestarian, pembinaan, perlindungan, pengembangan, pengawasan, pemanfaatan, koordinasi dan kerjasama, serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan nilai budaya dan seni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan dan data kebudayaan sebagai kelengkapan informasi dan analisa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pengembangan nilai budaya dan seni serta pelaksanaan objek pemajuan kebudayaan;
- b. penyiapan bahan-bahan pelestarian, pembinaan, perlindungan pengawasan, dan pemanfaatan serta rencana operasional pengembangan nilai budaya dan seni;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pelestarian, koordinasi, kerjasama dan monitoring di bidang pengembangan nilai budaya dan seni;

- d. penyampaian bahan informasi, pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Sejarah dan Purbakala

Tugas:

Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka mengumpulkan bahan, menginventarisir hasil kajian analisis, pendataan, untuk bahan konsep rumusan kebijakan pengelolaan, pendokumentasian, pelestarian, pemberdayaan, pemanfaatan, dan perlindungan aset serta peninggalan terkait sejarah, purbakala dan permuseuman, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana pengumpulan, inventarisir hasil kajian analisa data, yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Sejarah dan Purbakala;
- b. penyiapan rumusan dan konsep kebijakan pembinaan, pelestarian, pendokumentasian dan rencana operasional di Bidang Sejarah dan Purbakala;
- c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama lintas sektoral dalam menunjang kegiatan di Bidang Sejarah dan Purbakala;
- d. penyiapan rumusan dan konsep bahan kebijakan pengolahan aset serta peninggalan sejarah, purbakala, dan permuseuman sebagai langkah pelestarian dan pengembangan sesuai dengan

- peraturan dan perundangan yang berlaku di Bidang Sejarah dan Purbakala;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pendokumentasian di Bidang Sejarah dan Purbakala;
 - f. pembuatan laporan kegiatan di Bidang Sejarah dan Purbakala sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - g. penyampaian bahan informasi, pertimbangan dan saran kepada kepala Bidang Sejarah dan Purbakala; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Tugas:

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Dinas melakukan perumusan dalam rangka kebijakan teknis, memfasilitasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata serta pengembangan sumber daya pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. pengolahan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. penyusunan rencana program kerja tahunan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata

- d. pengorganisasian seluruh kegiatan pada bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. penganalisaan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- g. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat;
- h. penyiapan bahan informasi dan investasi pengembangan destinasi pariwisata;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan destinasi dan infrastruktur;
- j. pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- k. penyampaian bahan informasi, pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Bidang Pemasaran Pariwisata

Tugas:

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Dinas mempersiapkan perumusan dalam rangka kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi strategi promosi pariwisata, pengembangan pasar dan kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/kota dan stakeholders
- b. pariwisata untuk pengembangan pasar;
- c. perumusan kebijakan segmen pasar, strategi pemasaran dalam dan luar negeri;
- d. penguatan sarana promosi berbasis media/teknologi informasi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan promosi, publikasi dan pelayanan informasi pariwisata;
- e. pelaksanaan promosi kepariwisataan di dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pelaporan tugas bidang pemasaran pariwisata kepada kepala Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**Tugas:**

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, sarana dan prasarana, supervisi, pemantauan, analisis, dan pelaporan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis, pembinaan pengembangan ekonomi kreatif;

- b. Perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Fasilitasi dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan bahan rumusan kebijakan pengembangan produk inovatif dan tata kelola ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan potensi sumber daya, serta industri ekonomi kreatif;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kreatif.;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif kepada kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. UPTD Museum Siginjei

Museum Siginjei Jambi adalah museum umum mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional dan nasional.

Fungsi:

- a. Pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pengenalan dan menyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah

- c. Pelaksanaan perawatan/pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- d. Pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah
- e. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

j. UPTD Taman Budaya Jambi

Tugas:

Taman Budaya Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengembangan seni budaya lokal dan regional di Provinsi Jambi.

Fungsi :

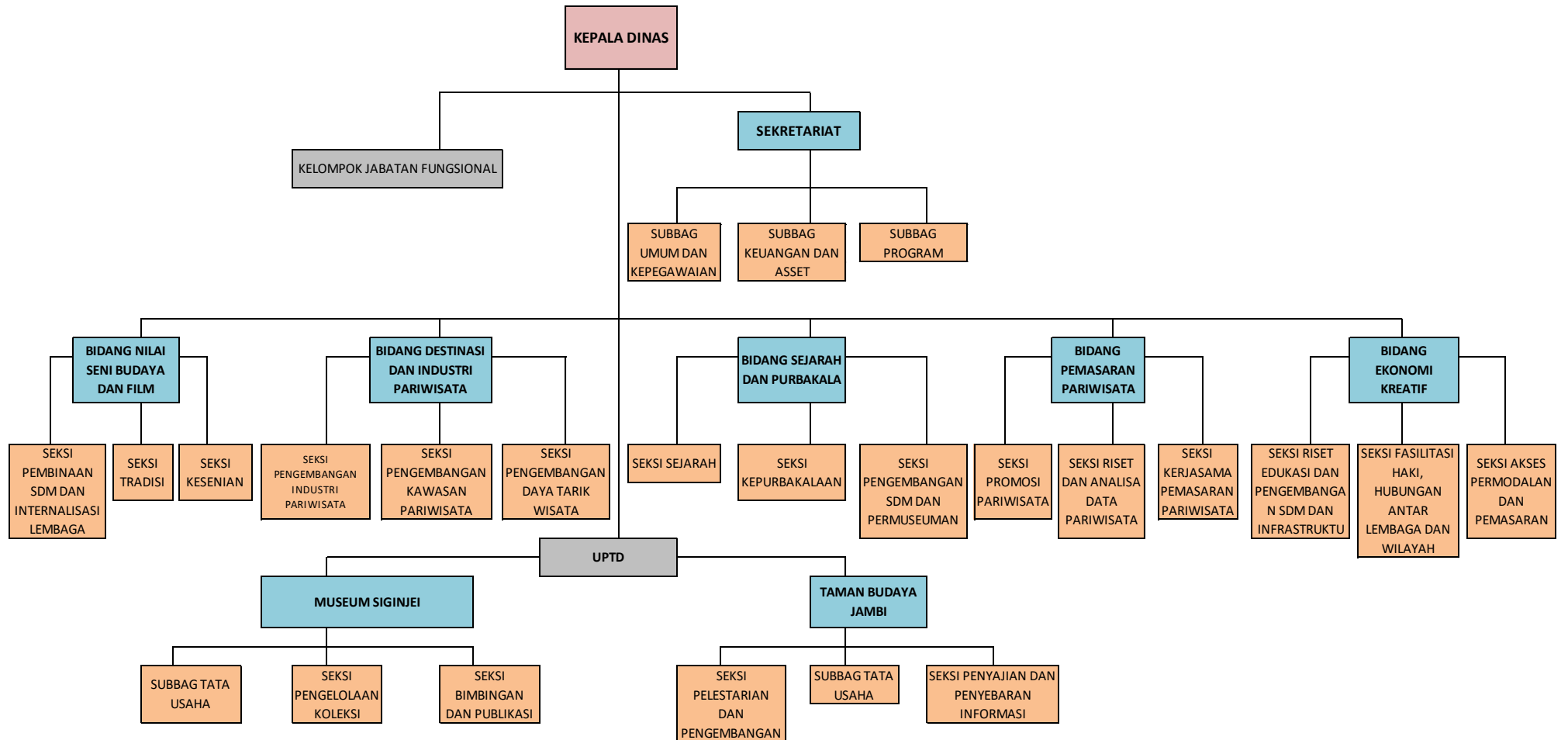
- a. Pelaksana kegiatan labor berupa pengkajian, revitalisasi pengolahan dan eksperimentasi
- b. Pelatihan dan bimbingan Seni budaya
- c. Pelaksana pameran dan pertunjukan seni budaya
- d. Pelaksana festival, lomba dan sayembara seni budaya
- e. Pelaksanaan ceramah, sarasehan, lokakarya, workshop, diskusi seminar dan temu karya.

- f. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, perpustakaan budaya, informasi seni, promosi dan sosialisasi karya seni budaya.
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan penunjang kesenian
- h. Pelaksana urusan tata usaha dan rumah UPTD.
- i. Pelaksaaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Kesemuanya dapat dilihat dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi berikut ini.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI**



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dilihat dari sudut pandang makro, Provinsi Jambi mempunyai aset kepariwisataan berupa keragaman budaya dan kekayaan alam, industri perhotelan dan restoran/rumah makan, dan industri pariwisata lainnya. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang yang lebih spesifik dan fokus terhadap pelaksanaan teknis dinas, sumber daya yang dimiliki dapat diidentifikasi pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Komposisi pegawai pada Disbudpar Provinsi Jambi

- a. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Golongan							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S-1	S-2	S-3	
1	LAKI-LAKI	0	0	21	6	30	4	0	61
2	PEREMPUAN	0	0	14	6	29	4	1	54
Jumlah				35	12	59	8	1	115

- b. Komposisi pegawai berdasarkan jumlah pejabat eselon

No	Jenis Kelamin	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	-	1	4	16	21
2	PEREMPUAN	-		4	6	10
Jumlah			1	8	22	31

- c. Komposisi pegawai berdasarkan golongan

No	Jenis Kelamin	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	-	12	37	9	58
2	PEREMPUAN	-	4	46	7	57
Jumlah			16	83	16	115

Secara kualitas kualifikasi Jabatan Pelaksana Disbudpar belum memenuhi standar kebutuhan SDM aparatur dikarenakan masih ada beberapa staf yang belum memenuhi kualifikasi pendidikannya. Hal

ini berkaitan dengan belum adanya perguruan tinggi yang memiliki jurusan pariwisata di Provinsi Jambi. Selain itu kebutuhan akan staf yang memiliki kompetensi khusus seperti kurator dan reparator koleksi museum juga belum terpenuhi karena selama beberapa tahun ini Pemerintah Provinsi tidak mengadakan penerimaan ASN. Perbandingan kualitas/jumlah sumber daya manusia/pegawai tidak proporsional dengan beban kerja dan tingkat kemampuan teknis/keterampilan sesuai bidang tugas belum memadai, dalam hal ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi dan manajemen pemasaran. Selain itu perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan waktu percepatan.

Untuk menunjang pelaksanaan layanan perkantoran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Jambi memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pendukung sarana dan prasarana meliputi;

Tabel 2.2 Sumber Daya Disbudpar Provinsi Jambi

No	Sumber Daya	Jenis Aset	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Sumber Daya Aparatur	a. Disbudpar b. Museum Siginjei c. Taman Budaya Jambi	Orang	70 38 7	
2	Fisik dan bangunan	a. Kantor Dinas b. Gedung Museum Siginjei c. Gedung MPRJ d. Gedung TBJ e. Gedung Olah Seni	Gedung	1 4 2 5 1	1.800.000 m ² 3.837.000 m ² 1.365.000 m ² 1.500 m ²
3	Peralatan dan mesin	Genset AC standing Komputer/laptop Printer	Unit Unit Unit Unit	3 23 45 30	Baik baik 3 rusak 2 rusak
4	Alat transportasi	a. Kendaraan R-4 b. Kendaraan R-2 c. Kendaraan R-3	Unit Unit Unit	13 36 1	Baik Baik Baik

No	Sumber Daya	Jenis Aset	Satuan	Jumlah	Keterangan
5	Alat studio dan komunikasi	1. (Kamera, proyektor, cctv, dvd) 2. Peralatan sound system	Item	77	Secara umum dalam kondisi baik
6	Jaringan	1. Air minum 2. Wifi	Jaringan	2	Dalam kondisi baik
7	Benda bercorak kebudayaan dan sejarah	a. Koleksi Museum Signjei b. Koleksi MPRJ c. Koleksi Gentala Arasy	Koleksi Koleksi Koleksi	3.494 472 54	Dalam kondisi baik

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan mengambil tolok ukur capaian kinerja Dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi sampai dengan akhir tahun 2020, maka capaian kinerja yang dapat terukur adalah: (1) Jumlah kunjungan wisatawan; (2) Jumlah SDM bersertifikasi (3) Persentase destinasi yang memenuhi standar; (4) Jumlah kunjungan museum; (4) Jumlah karya seni budaya yang didaftarkan pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (5) Persentase seni tradisi yang dikembangkan; dan (6) Persentase peningkatan karya budaya pelaku seni, dapat diilustrasikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.3 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

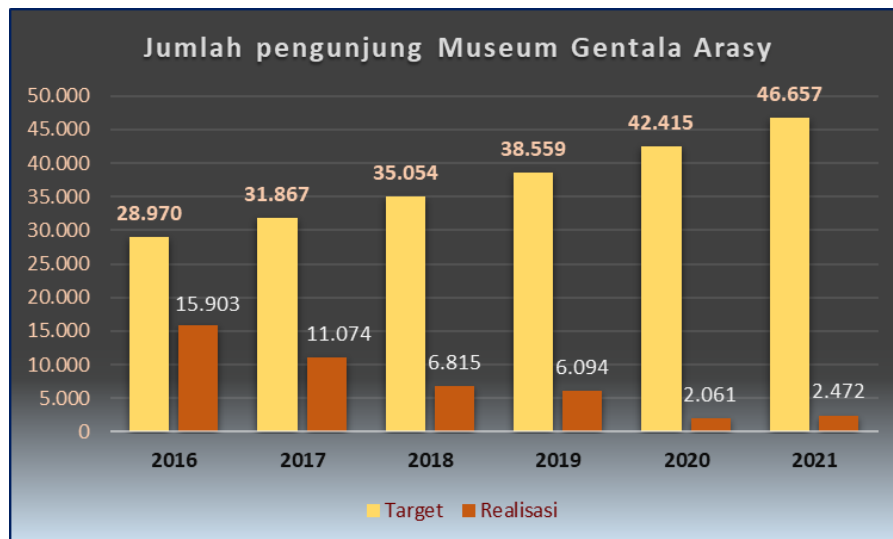
TABEL T-C.23																							
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi																							
NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian Pada Tahun Ke -						
					1		2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(16)	(17)	(18)	(20)
1	Persentase peningkatan kunjungan wisata				10	persen	11	13	16	19		10	11	13	16			100	100	100	100		
	Wisatawan mancanegara				9	persen	14	16	17	18	18	9	14	16	17	7	5	100	100	100	100	38,89	27,78
	Wisatawan nusantara				4.700	kunjungan	5.300	5.900	6.500	7.000	7.500	12.069	5.378	10.887	10.526	2.638	2.349	100	100	100	100	37,69	31,32
					10	persen	17	16	16	16	16	10	17	16	16	14	17,25	100	100	100	100	87,50	107,81
					925.300	kunjungan	925.900	929.100	929.500	930.500	934.500	2.741.379	2.156.777	2.388.673	2.094.549	895.528	1.389.413	100	100	100	100	96,24	148,68
2	Persentase SDM bersertifikaasi				14	persen	15	16	17	18	19	14	15	16	17	18	19	100	100	100	100	100	100
					30	orang	30	30	30	30	30	400	400	79	30	30	90	100	100	100	100	100	
3	Persentase destinasi wisata yang memenuhi standar				11	persen	12	12	14	15	21	0	12	12	0	0	21	0,00	100	100	0,00	0,00	100,00
					1	paket	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	3	0,00	100	100	0,00	0,00	
4	Persentase seni tradisi yang dikembangkan				12	persen	13	14	15	16	10	0	13	14	15	0	22	0,00	100	100	100	0,00	220,00
					17	kali	19	21	23	27	0	20	30	30	2	0,00	100	100	100	100	7,41		
5	Persentase peningkatan karya budaya pelaku seni				11	persen	13	14	15	18	20						26						
					77.949	orang	82.795	88.003	93.605	99.638	106.105	40.496	43.645	33.731	47.560	11.882	18.862	51,95	52,71	38,33	50,81	11,93	17,78
6	Jumlah karya budaya daerah yang				10	karya	10	10	10	10	10	29	18	19	18	0	22	100	100	100	100	0,00	2,20

Gambaran capaian kinerja Disbudpar Provinsi Jambi periode Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada table dan grafik berikut:

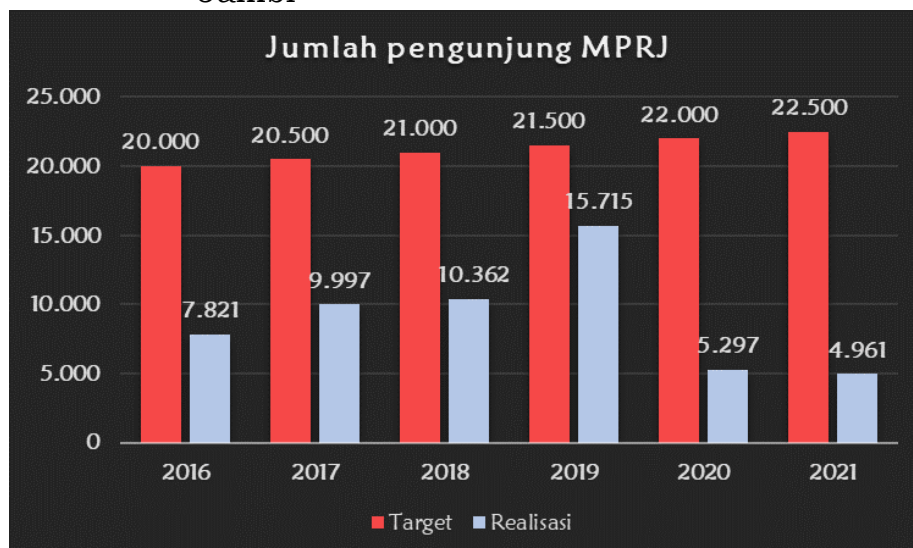
Grafik 2.1 Jumlah pengunjung Museum Siginjei



Grafik 2.2 Jumlah pengunjung Museum Gentala Arasy



Grafik 2.3 Jumlah pengunjung Museum Perjuangan Rakyat Jambi



Grafik 2.4 Rekapitulasi jumlah pengunjung museum tahun 2016-2021



Selama periode 2016-2021 jumlah kunjungan ke museum tidak mencapai target walaupun terjadi peningkatan kunjungan pada tahun 2017 dan 2019. Beberapa aspek yang menyebabkan masih rendahnya kunjungan ke museum adalah terbatasnya kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke museum karena kurangnya kegiatan yang menunjang jumlah kunjungan. Museum mulai dapat menyelenggarakan kegiatan yang lebih bervariasi dan inovatif setelah mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus.

Selain itu bencana kabut asap dan pandemi yang beruntun melanda Provinsi Jambi menyebabkan ditutupnya pelayanan kunjungan ke museum dalam kurun waktu yang cukup lama juga mempengaruhi pencapaian target kinerja. Penyebab lainnya adalah rendahnya animo masyarakat untuk mengulang kunjungan. Seperti halnya di Museum Gentala Arasy dimana jumlah koleksi masih sedikit dan belum beragam.

NO	JENIS KOLEKSI	NO INVENTARIS	UNIT
1	GEOLOGIKA	107	235
2	BIOLOGIKA	119	119
3	ETNOGRAFIKA	1.759	2.996
4	ARKEOLOGIKA	155	2.187
5	HISTORIKA	69	69
6	NUMISMATIKA HERALDIKA	498	1.425
7	FILOLOGIKA	89	89
8	KERAMOLOGIKA	436	436
9	SENI RUPA	104	132
10	TEKNOLOGIKA	119	202
JUMLAH		3.455	7.890

Adapun rekapitulasi koleksi museum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 JUMLAH KOLEKSI MUSEUM SIGINJEI TAHUN 2021/2022

Tabel 2.5 DAFTAR KOLEKSI MUSEUM PERJUANGAN RAKYAT JAMBI

NO	JENIS KOLEKSI	JUMLAH
1.	Senjata tradisional (keris, kampilan, tombak, pedang, samurai dan lain lain)	42 buah
2.	Senjata konvensional (pistol, senapan, peluru mortir dan lain-lain)	56 buah
3.	Perlengkapan perang baju, bingkai, kopel, penggado, alat komunikasi dan lain-lain)	21 buah
4.	Mata uang	25 buah
5.	Naskah/dokumen dan lain	56 judul
6.	Foto-foto perjuangan	260 buah
J U M L A H		460 buah

Tabel 2.6 JUMLAH KOLEKSI MUSEUM SIGINJEI, MPRJ DAN GENTALA ARASY SAMPAI 2021

NO	NAMA MUSEUM	JUMLAH KOLEKSI	PENAMBAHAN TAHUN 2021	KET.
1	SIGINJEI	7.890 unit	5	Hibah
2	MPRJ	460 buah	-	
3	GENTALA ARASY	67 buah	-	

Capaian kinerja bidang kebudayaan lainnya adalah warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan sebagai WBTB nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan karya seni yang telah mendapat sertifikat HAKI di Kemenkumham RI.

Tabel 2.7 Warisan Budaya Takbenda Indonesia asal Provinsi Jambi hasil penetapan tahun 2013-2021

No.	WBTB	Asal	Domain	SK Penetapan Menteri
2013				
1	Krinok	Kab. Bungo	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No. 283/M/2013
2014				
1	Aksara Incung (aksara Ka-Ga-Nga Kerinci)	Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	Tradisi dan ekspresi lisan	SK Mendikbud No. 270/P/2014
2	Seloko Melayu Jambi	Provinsi Jambi	Tradisi dan ekspresi lisan	SK Mendikbud No. 270/P/2014
3	Senandung Jolo	Kab. Muaro Jambi	Tradisi dan ekspresi lisan	SK Mendikbud No. 270/P/2014
2015				
4	Kompangan/Hadrah	Kota Jambi	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 180/M/2015
5	Kuaw	Kabupaten Merangin	Tradisi dan ekspresi lisan	SK Mendikbud No: 180/M/2015
6	Tari Anggut	Kota Jambi	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 180/M/2015
7	Tari Besayak	Kabupaten Merangin	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 180/M/2015
8	Tari PiringTujuh	KabupatenTebo	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 180/M/2015
9	Tari Pisang	Kabupaten Merangin	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 180/M/2015
10	Tupai Pisang	Kabupaten	Tradisi dan ekspresi lisan	SK Mendikbud No:

No.	WBTB	Asal	Domain	SK Penetapan Menteri
		Kerinci		180/M/2015
11	Tupai Jenjang	Kabupaten Kerinci	Tradisi dan ekspresi lisan	SK Mendikbud No: 180/M/2015
12	Upacara Besale	Kab. Muaro Jambi & Kab. Batanghari	Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan	SK Mendikbud No: 180/M/2015
2016				
13	Musik Kalinong	Kab. Merangin	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 244/P/2016
14	Musik Kromong Mandiangin	Kabupaten Sarolangun	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 244/P/2016
15	Tale Nek Jei (Tale keberangkatan Haji)	Kota Sungai Penuh & Kab. Kerinci	Tradisi dan ekspresi lisan	SK Mendikbud No: 244/P/2016
16	Tari Kain Kromong	Kabupaten Sarolangun	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 244/P/2016
17	Tari Tauh	Kabupaten Bungo	Seni pertunjukan	SK Mendikbud No: 244/P/2016
18	Upacara Asyeik	Kota Sungai Penuh & Kab. Kerinci	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	SK Mendikbud No: 244/P/2016
2017				
19	Ambung Orang Rimbo	Kabupaten Sarolangun	Kemahiran dan kerajinan tradisional	SK Mendikbud No: 260/M/2017
20	Cawot	Kabupaten Sarolangun	Kemahiran dan kerajinan tradisional	SK Mendikbud No: 260/M/2017
21	Hompongan	Kabupaten Sarolangun	Pengetahuan dan kebiasaan, perilaku mengenai alam dan semesta	SK Mendikbud No: 260/M/2017
22	Melangun Orang Rimbo	Kabupaten Sarolangun	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan - perayaan	SK Mendikbud No: 260/M/2017
23	Musik Gambang Dano Lamo	Kabupaten Muaro Jambi	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No: 260/M/2017
24	Sebelik Sumpah	Kabupaten Sarolangun	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	SK Mendikbud No:260/M/2017
25	Tari Elang	Kabupaten Sarolangun	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:260/M/2017

No.	WBTB	Asal	Domain	SK Penetapan Menteri
26	Tari Kadam	Kab. Merangin	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:260/M/2017
27	Tomboi Sialong/ Tomboi Ngambek Rapa	Kabupaten Merangin	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta	SK Mendikbud No:260/M/2017
28	Ubat Ramuoan Orang Rimbo	Kabupaten Sarolangun	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta	SK Mendikbud No:260/M/2017
2018				
29	Ampek Gonjie Limo Gonop	Kabupaten Merangin	Tradisi dan Ekspresi Lisan	SK Mendikbud No: 264/M/2018
30	Kenduri Sko	Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan	SK Mendikbud No:264/M/2018
31	Lapaek Koto Dian Rawang	Kota Sungai Penuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	SK Mendikbud No:264/M/2018
32	Ngagoah Imo Pulau Tengah	Kab. Kerinci	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No: 264/M/2018
33	Ntak Awo	Kota Sungai Penuh	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:264/M/2018
34	Perkampungan Tradisional Rumah Tuo Rantau Panjang	Kabupaten Merangin	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta	SK Mendikbud No:264/M/2018
35	Rangguk Kumun	Kota Sungai Penuh	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:264/M/2018
36	Tari Iyo-Iyo	Kota Sungai Penuh dan Kab Kerinci	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:264/M/2018
37	Tauh Lempur	Kabupaten Kerinci	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:264/M/2018
2019				
38	Tari Ayam Biring	Kabupaten Sarolangun	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:362/M/2019
39	Betauh Perentak	Kab Merangin	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan	SK Mendikbud No:362/M/2019
40	Dideng	Kabupaten Bungo	Tradisi dan Ekspresi Lisan	SK Mendikbud No:362/M/2019

No.	WBTB	Asal	Domain	SK Penetapan Menteri
41	Dzikir Berdah Muaro Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:362/M/2019
42	Lubuk Larangan	Kabupaten Bungo	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta	SK Mendikbud No:362/M/2019
43	Malam Tari Inai	Kab. Tanjung Jabung Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan	SK Mendikbud No:362/M/2019
44	Nek Pung	Kabupaten Tebo	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud No:362/M/2019
45	Sungku	Kabupaten Merangin	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	SK Mendikbud No:362/M/2019
46	Tapa Malenggang	Kab. Batanghari	Tradisi dan Ekspresi Lisan	SK Mendikbud No: 362/M/2019
47	Tkud	Kabupaten Muaro Jambi	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta	SK/Mendikbud No:362/M/2019
2020				
48	Dadung	Kabupaten Batanghari	Tradisi dan ekspresi lisan	SK Mendikbud No:1044/P/2020
49	Mandi Ke Aek	Kabupaten Tebo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan	SK Mendikbud No:1044/P/2020
2021				
50	Ngayun Luci	Kabupaten Kerinci	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan	SK Mendikbud-Ristek Nomor 379/P/2021
51	Tari Ngebeng	Kabupaten Batanghari	Seni Pertunjukan	SK Mendikbud-Ristek Nomor 379/P/2021
52	Tirai Penganten/Pelaminan Kungkai	Kabupaten Merangin	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	SK Mendikbud-Ristek Nomor 379/P/2021

Tabel 2.8 DAFTAR KARYA SENI YANG TELAH MENDAPAT SERTIFIKAT

HAKI DI KEMENKUMHAM RI TAHUN 2015 - 2021

No.	JENIS/ JUDUL KARYA	NAMA PENCIPTA
TAHUN 2015 (13 KARYA)		
1.	Lagu Budaya Jambi	A. LATIF
2.	Lagu Negeri Jambi	RIVIANDY
3.	Lagu Negeri Pusako	R. IRWANSYAH
4.	Lagu Makmurnyo Negeri	RIVIANDY
5.	Lagu Pucuk Jambi Sembilan Lurah	YUSRIZAL BURHAN
6.	Lagu Nyanyian Anak Rantau	A. LATIF
7.	Lagu Semanggang Billah	KEMAS SOLIHIN
8.	Lagu Tanah Pilih	FERRRY FEBRIANSYAH DAN EKO FERDIANSYAH
9.	Lagu Sultan Thaha	A. LATIF
10.	Lagu Sekapur Sirih	MARZUKI LAZIM
11.	Naskah Dosa Yang Tersisa	DIDIN SIROJUDIN
12.	Naskah Kepompong	DIDIN SIROJUDIN
13.	Naskah Menggungat Jalan Setapak	DIDIN SIROJUDIN
TAHUN 2016 (14 KARYA)		
14.	Lagu Datuk Ae	AZHAR. MJ
15.	Lagu Balek La Mamak	AZHAR. MJ
16.	Lagu Mars Provinsi Jambi	A. LATIEF/ RIVIANDY
17.	Lagu Tekuluk	RIVIANDY
18.	Lagu Zapin Kota Jambi	A. LATIEF/ RIVIANDY
19.	Lagu Jambi Di Kenang	RIVIANDY
20.	Lagu Tali Kasih	R. IRWANSYAH
21.	Lagu Cinto Tepisah	R. IRWANSYAH
22.	Lagu Mak Gatal	M. PAHBI
23.	Lagu Pokemon	M. PAHBI
24.	Lagu Karna Allah Yang Pertemukan	YANUAR ERSHAD
25.	Naskah Putri Lindung Bulan Dan Tupai Jenjang	DIDIN SIROJUDIN
26.	Buku Nandung Batu Pelangi	JUNAIDI T. NOOR
27.	Buku Nandung Bumi	JUNAIDI T. NOOR
TAHUN 2017 (18 KARYA)		
28.	Lagu Ntak Kudo	ANDRI
29.	Lagu Tari Ntak Kudo	ANDRI
30.	Tari Batampo	EMI LIDIAR
31.	Tari Persembahan	ZURTINI
32.	Lagu Membangun Negeri	R. IRWANSYAH
33.	Lagu Nasehat Orang Tuo	RIVIANDY
34.	Lagu Merano Ati	R. IRWANSYAH/ RIVIANDY
35.	Lagu Negeri Yang Diberkahi	R. IRWANSYAH
36.	Lagu Joget Riuh Budaya	S. NASOR HOLILI BARAGBA DAN AINI
37.	Lagu Zapin Tanah Pusako	S. NASOR HOLILI BARAGBA DAN HARDIANSYAH
38.	Naskah Tembak	TITAS SUWANDA
39.	Naskah Telur Itik	RANDA GUSMORA
40.	Lagu/ Negeri Jambi Tercinto	ZURHATMI ISMAIL
41.	Lagu/ Tari Kain	ZURHATMI ISMAIL

No.	JENIS/ JUDUL KARYA	NAMA PENCIPTA
42.	Lagu/ Kelintang	ZURHATMI ISMAIL
43.	Lagu/ Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah	WIRO A. SANIE
44.	Lagu/ Melayu	WIRO A. SANIE
45.	Lagu/ Idak Betanyo	WIRO A. SANIE
46.	Jambi Ku Kini	R. IRWANSYAH
TAHUN 2018 (19 KARYA)		
47.	Negeri Tepian Laut	KUSHENDRA DAN HERMANSYAH
48.	Hymne Tanjung Jabung Barat	HERMANSYAH
49.	Indonesia Poros Maritim Dunia	HERMANSYAH
50.	Sultan Thaha	SYAFARUDDIN
51.	Gadis Dusun	SYAFARUDDIN
52.	Dendang Nasib Badan	SYAFARUDDIN
53.	Terkenang	SYAFARUDDIN
54.	Jago Negeri	RIVIANDY
55.	Tanah Melayu Jambi	RIVIANDY DAN A. LATIEF
56.	Keris Siginjai	RIVIANDY
57.	Nina Bobo	NAFRI DWI BOY
58.	Pagar	KHAIRUL FAJRI
59.	Tari Piring Tujuh	ERI ARGAWAN
60.	Tari Sirih Layang Pekasih	ERI ARGAWAN
61.	Tari Luci Genyi	ERI ARGAWAN
62.	Tari Tapak Khadam	ERI ARGAWAN
63.	Tari Tudung Muko	ERI ARGAWAN
64.	Tari Rangguk Sko	ERI ARGAWAN
TAHUN 2019 (18 KARYA)		
65.	Datuk Darah Putih	PUTERI ASTRY
66.	Senandung Lagu Jambi	RTS. SRI RAHAYU
67.	Nandung Pagi	R. HERMANSYAH
68.	Gentala Arasy	HENKY SETIAWAN
69.	Arakan Sahur	A. LATIF & RIVIANDY
70.	Kuala Tungkal	RIVIANDY
71.	Nantik Batunang	A.LATIF & RIVIANDY
72.	Pantun Seloko	ASWANDI
73.	Tudung Lingkup	FEBRIANA WULANDARI
74.	Negeri Budaya	GUSTI RAHAYU
75.	Umoh Lahek(Rumah Larik)	ERNI YUSNITA, SE
76.	Jangki Ke Ladang	ERNI YUSNITA, SE
77.	Jangki	ERNI YUSNITA, SE
78.	Lakon Burung Hantu	TITAS SUWANDA
79.	Zapin Kampung Melayu	ERI ARGAWAN
80.	Motif Kapal Cik Upik	ZAINUL BAHRI
81.	Motif Ikan Merah/Ikan Botra	ZAINUL BAHRI
82.	Motif Burung Kuntul	ZAINUL BAHRI
TAHUN 2020 - NIL -		
TAHUN 2021 (20 KARYA)		

No.	JENIS/ JUDUL KARYA	NAMA PENCIPTA
83.	Lagu Pemuda Berselempang Merah	ANDRIAN PERNANDO
84	Lagu Sumpah Untuk Negeri	R. IRWANSYAH
85	Lagu Raden Mattaher	FERRY BAHRI
86	Motif Stupa Candi Solok Sipin	ZAINUL BAHRI
87	Motif Kapal Cik Upik	ZAINUL BAHRI
88	Motif Ikan Botia (Ikan Merah) Dan Ikan Ringo	ZAINUL BAHRI
89	Motif Burung Kuntul	ZAINUL BAHRI
90	Buku Nada Nada Purba Alam	M. ALI SURAKHMAN
91	Buku Menguak Rahasia Sastra Incung Kerinci	M. ALI SURAKHMAN
92	Tari Marcok	ISKANDAR ZAKARIA AHLI WARIS
93	Lagu Betung Berdarah	MEIZA TETY QADARSIH ASWANDI
94	Lagu Tugu Juang Jambi	YANUAR ERSAD
95	Lagu Panglimo Kincai	ANDRA DAN YANDRI
96	Lagu Kesatrio Negeri	FREDY FRISTAMA
97	Lagu Simpang Tigo Sipin	FREDY FRISTAMA
98	Lagu Barisan Selempang Merah	GUSTI RAHAYU
99	Naskah Sintung Pelalaw	SITI SAIRA.H
100	Tari Kembang Dana Sara	ERI ARGAWAN
101	Lagu Kesatria Pengabuan	KIKY GUNAWAN
102	Mars Perkempinas	ENDANG SUPRIYADI

Gambaran capaian target kunjungan wisatawan dapat dilihat dari table dan grafik berikut:

Tabel 2.9 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	6.477	1.386	5.325	3.859	138	-
Merangin	-	-	-	238	-	-
Sarolangun	157	108	135	64	-	-
Batanghari	54	54	65	49	-	-
Muaro Jambi	378	545	713	424	-	-
Tanjabtlim	42	16	19	5	-	-
Tanjabbar	36	54	53	25	-	-
Bungo	36	16	22	8	-	-
Tebo	24	27	13	1	-	-
Kota Jambi	4.834	3.160	4.523	5.328	1.765	2.135
Sungai Penuh	30	13	19	525	-	-
Total	12.069	5.378	10.887	10.526	1.903	2.135

Pada periode tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 55,44% dimana pada tahun 2016 sebanyak 12.069 orang menjadi 5.378 orang pada tahun 2017. Pada periode tahun 2017-2018 terjadi

peningkatan sebesar 102,44% dimana pada tahun 2017 sebanyak 5.378 orang menjadi 10.887 orang pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 3,32 %. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah kunjungan turun tajam sebesar 81,9% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 10,87%

Tabel 2.10 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	328.965	266.554	359.667	387.584	186.825	252.324
Merangin	520.862	431.355	465.000	448.933	29.228	246.939
Sarolangun	32.897	21.568	34.389	43.130	54.328	93.874
Batanghari	35.638	17.254	37.106	40.799	3.433	17.530
Muaro Jambi	274.138	258.813	265.300	104.827	60.600	85.800
Tanjabtlim	16.448	8.627	9.012	9.525	25.678	38.974
Tanjabbar	54.828	45.782	58.571	14.760	44.468	25.164
Bungo	109.655	97.055	91.045	91.045	84.747	184.863
Tebo	219.310	258.813	125.750	106.049	94.764	162.808
Kota Jambi	1.011.569	653.900	867.500	886.971	295.945	268.308
Sungai Penuh	137.069	97.055	75.333	40.799	15.512	10.693
Total	2.741.379	2.156.777	2.388.673	2.094.549	895.528	1.387.278

Pada periode tahun 2015-2016 terjadi peningkatan sebesar 10,64 % dimana pada tahun 2015 sebanyak 2.477.660 orang menjadi 2.741.379 orang pada tahun 2016. Pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 21,33% dimana pada tahun 2016 sebanyak 2.741.379 orang menjadi 2.156.777 orang pada tahun 2017. Periode 2017-2018 terjadi peningkatan 10,75% dimana pada tahun 2017 sebanyak 2.156.777 orang menjadi 2.388.673 orang pada 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 12,31% dan menurun sebanyak 166,2% pada 2020. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 35,44%

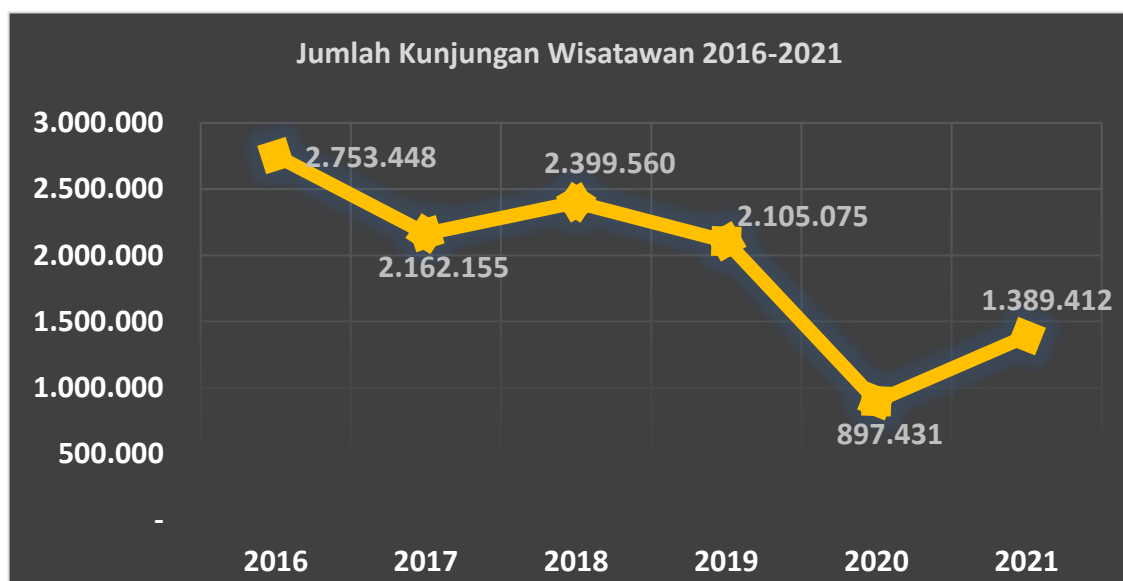
Tabel 2.11 Jumlah kunjungan wisatawan (gabungan)

KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	335,442	267,940	364,992	391.443	186.963	252.324
Merangin	520,862	431,355	465,000	449.171	29.228	246.939
Sarolangun	33,053	21,675	34,524	43.194	54.328	93.874
Batanghari	35,692	17,308	37,171	40.739	3.433	17.530

Ma. Jambi	274,516	259,358	266,013	105.251	60.600	85.800
Tanjabtim	16,491	8,643	9,031	9.530	25.678	38.974
Tanjabbar	54,864	45,836	58,624	14.785	44.468	25.164
Bungo	109,691	97,071	91,067	11.289	84.747	184.863
Tebo	219,334	258,840	125,763	106.050	94.764	162.808
Kota Jambi	1,016,403	657,060	872,023	892.299	297.710	270.443
Sungai Penuh	137,099	97,068	75,352	41.324	15.512	10.693
Total	2,753,448	2,162,155	2,399,560	2.105.075	897.431	1.389.412

Pada periode tahun 2015-2016 terjadi peningkatan sebesar 10,65 % dimana pada tahun 2015 jumlah wisatawan sebanyak 2.488.436 orang meningkat menjadi 2.753.448 orang pada tahun 2016. Pada periode tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 21,47 % dimana pada tahun 2016 jumlah wisatawan adalah 2.753.448 orang menjadi 2.162.155 orang pada tahun 2017. Pada periode tahun 2017-2018 terjadi peningkatan sebesar 10,98 % dimana pada tahun 2017 sebanyak 2.162.155 orang menjadi 2.399.560 orang pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penurunan jumlah wisatawan adalah sebesar 12,3 % dan menurun sebanyak 166,6% persen pada tahun 2020. Pada 2021 terjadi peningkatan sebesar 35,41%.

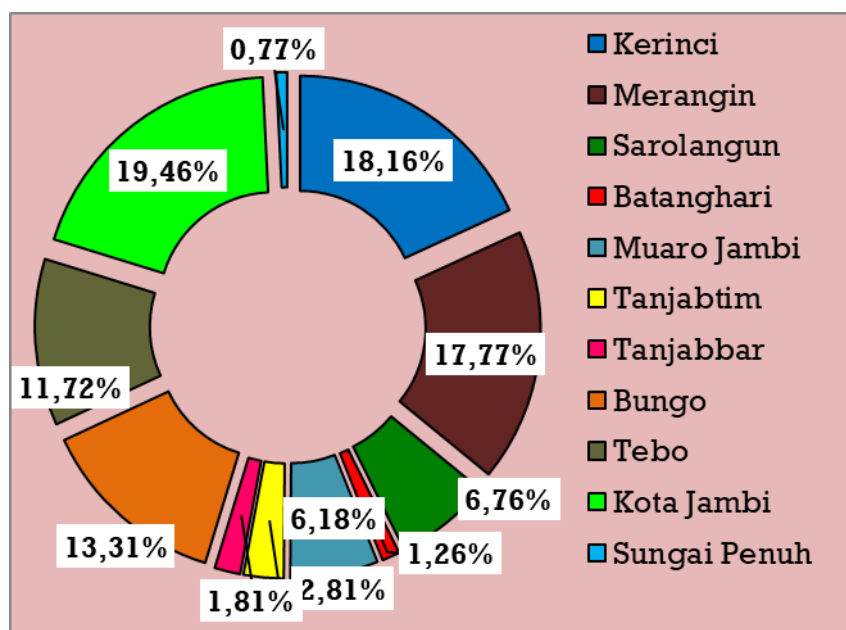
Grafik 2.5 Kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi tahun 2016-2021



Penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup signifikan disebabkan oleh dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta pandemi Covid-19 dimana banyak fasilitas akomodasi dan destinasi wisata yang juga ditutup untuk umum serta pembatasan bepergian dengan kendaraan umum dan pesawat selama beberapa bulan. Hal ini juga berdampak pada dibatalkannya pelaksanaan event-event pariwisata dan kegiatan-kegiatan yang bersifat keramaian.

Pada tahun 2021 dengan dibukanya kembali objek wisata di kabupaten/kota, wisatawan mulai datang ke Jambi. Juga didukung dengan dibukanya kembali penerbangan ke Jambi serta adanya event-event dengan protokoler kesehatan.

Grafik 2.5 Persentase Sebaran Kunjungan Wisatawan Tahun 2021



Sebaran kunjungan wisatawan terbanyak selama tahun 2021 adalah ke Kota Jambi sebesar 19,46%. Sebagai ibukota provinsi Kota Jambi menjadi pusat kedatangan pengunjung dari luar daerah dan event-event berskala daerah dan nasional. Terbanyak kedua adalah Kabupaten Kerinci, 18,16% yang menjadi tujuan wisata dari kabupaten sekitar dan Kota Jambi khususnya pada masa liburan, terlebih lagi animo masyarakat untuk berwisata setelah adanya kelonggaran untuk bepergian dalam masa pandemi cukup tinggi.

Selanjutnya adalah Kabupaten Merangin dengan wisata unggulannya Geopark Merangin sebesar 17,77%.

Pembinaan desa wisata telah dilakukan di kabupaten/kota namun masih terkendala sumber daya masyarakat sekitar yang masih belum yakin sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian. Sampai tahun 2019 telah diresmikan sebanyak 6 (enam) desa wisata.

Tabel 2.12 Desa wisata yang telah diresmikan

NO	NAMA DESA WISATA	LOKASI	NOMOR SK	POTENSI/ KEUNGGULAN
1	LEKOK 50 TUMBI LEMPUR	Desa Lempur, Kabupaten Kerinci	SK Bupati Nomor 556/Kep.317/ 2018	Ekowisata
2	MUARA JAMBI	Desa Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi	SK Kepala Desa Muara Jambi Nomor 751 Tahun 2016,	Wisata sejarah/ Candi Muarajambi
3	MENGKARANG PURBA	Desa Bedeng Rejo, Kabupaten Merangin	SK Kepala Dinas Parpora Kabupaten Merangin Nomor 133 Tahun 2018,	Fosil Sungai Mengkarang Purba
4	JERNIH JAYA	Desa Jernih Jaya, Kabupaten Kerinci	SK Bupati Nomor 556/ Kep. 317/2018	Ekowisata/ Rawa Bento
5	BATU TUO AIR BATU	Desa Air Batu, Kabupaten Mera	SK Kepala Dinas Parpora, Kabupaten. Merangin Nomor 133 Tahun 2018,	Geopark Merangin
6	PENTAGEN	Desa Pendung Talang Genting (Pentagen), Kabupaten Kerinci	SK Bupati Nomor 556/ Kep. 317/2018	Taman Wisata Pertiwi

Adapun desa wisata yang termasuk kategori rintisan, berkembang dan mandiri adalah sebagai berikut.

Tabel 2.13 Rekapitulasi Desa Wisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

No	Nama Desa	Lokasi	Potensi	Level
1	Lubuk Beringin	Bathin III Ulu, Kab. Bungo	Wisata alam (pemandian)	Rintisan

No	Nama Desa	Lokasi	Potensi	Level
2	Renah Sungai Besar	Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo	Wisata alam (air terjun)	Rintisan
3	Pangkal Babu	Tungkal Satu, Kab. TJB	Ekowisata mangrove, budi daya hasil kebun	Rintisan
4	Sukarejo	Betara, Kab. Tj. Jabung Barat	Agrowisata kopi, taman bonsai, dan perkebunan kopir	Rintisan
5	Pematang Buluh	Betara, Kab. Tj. Jabung Barat	Pemandian air panas, jembatan rawa Karindangan	Rintisan
6	Muntialo	Betara, Kab. Tj. Jabung Barat	Taman Muntialo, embung desa, bumi perkemahan	Rintisan
7	Sungai Keradak	Batang Asai, Kab. Sarolangun	Alam (air garam inum tinggi)	Rintisan
8	Muara Air Dua	Batang Asai, Kab. Sarolangun	Alam (panorama Bukit Tapan)	Rintisan
9	Napal Melintang	Limun, Kab. Sarolangun	Alam (goa)	Rintisan
10	Meribung	Limun, Kab. Sarolangun	Alam (goa)	Rintisan
11	Lubuk Jering	Air Hitam, Kab. Sarolangun	Alam, budaya	Rintisan
12	Bukit Suban	Air Hitam, Kab. Sarolangun	Panorama Bukit Puncak Suban	Rintisan
13	Perintis	Rimbo Bujang, Kab. Tebo	Pemandian alami, taman bunga, budaya	Rintisan
14	Teluk Kembang Jambu	Tebo Ulu, Kab. Tebo	Panorama, budaya, taman	Rintisan
15	Balai Rajo	VII Koto Iilir, Kab. Tebo	Panorama, budaya, taman	Rintisan
16	Betung Bedarah Barat	Tebo Tengah, Kab. Tebo	Wisata alam dan buatan	Rintisan
17	Danau Ugo	Batin XXIV, Kab. Batanghari	Alam (Danau Ugo)	Rintisan
18	Dano Lamo	Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi	Alam, budaya, religi, kompleks percandian	Rintisan
19	Desa Baru	Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi	Buatan	Rintisan
20	Tanjung Lanjut	Sekernan, Kab. Muaro Jambi	Alam	Rintisan
21	Koto Rendah	Siulak, Kab. Kerinci	Wisata sejarah dan budaya	Rintisan
22	Hiang Tinggi	Sitinjau Laut, Kab. Kerinci	Wisata sejarah dan budaya	Rintisan
23	Batang Merangin	Batnag Merangin, Kab. Kerinci	Wisata alam, kuliner	Rintisan
24	Pulau Sangkar	Bukit Kerman, Kab. Kerinci	Wisata alam, buatan, agrowisata, kuliner	Rintisan
25	Koto Petai	Danau Kerinci, Kab. Kerinci	Wisata alam, buatan, kuliner	Rintisan
26	Serengkuh Dayung Serentak Catang se-Pulau Tengah	Danau Kerinci, Kab. Kerinci	Wisata alam, sejarah, warisan budaya	Rintisan
27	Air Terjun	Siulak, Kab. Kerinci	Wisata alam, buatan, industry kreatif	Rintisan
28	Air Batu	Renah Pembarap, Kab. Merangin	Arung jeram, geopark, fosil fauna berusia Parem awal 300 juta tahun	Rintisan
29	Bedeng Rejo	Bangko Barat, Kab. Merangin	Zona inti geopark, fosil flora fauna berusia 300 juta tahun, <i>tubing</i>	Rintisan
30	Desa Tuo	Lembah Masurai, Kab. Merangin	Air terjun Segerincing, batu megalitik	Rintisan
31	Pulau Tengah	Jangkat, Kab. Merangin	Panorama alam, perkampungan rumah tuo	Rintisan
32	Lubuk Bangkar	Batang Asai, Kab. Sarolangun	Alam (Panorama Bukit Tempurung)	Berkembang
33	Jernih	Air Hitam, Kab. Sarolangun	Alam (Bendungan Air Muap)	Berkembang
34	Muara Jambi	Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi	Alam, budaya, religi, kompleks percandian	Berkembang
35	Bahari Ceria	Kuala Jambi, Kab. Tj. Jabung Timur	Café bernuansa alam, menjaring sondong, panen kerang bambu, mangrove, habitat kunang-kunang	Berkembang

No	Nama Desa	Lokasi	Potensi	Level
36	Pendung Mudik	Air Hangat, Kab. Kerinci	Wisata alam, buatan, sejarah dan warisan budaya	Berkembang
37	Tambak Tinggi	Depati Tujuh, Kab. Kerinci	Wisata alam, buatan, kuliner	Berkembang
38	Kersik Tuo	Kayu Aro, Kab. Kerinci	Wisata alam, kuliner, cenderamata	Berkembang
39	Mekar Sari	Kayu Aro, Kab. Kerinci	Wisata alam, buatan, budaya	Berkembang
40	Lubuk Benteng	Bathin III, Kab. Bungo	Wisata alam (danau)	Mandiri
41	Pendung Talang Genting (Pentagen)	Danau Kerinci, Kab. Kerinci	Wisata buatan, kuliner, cenderamata	Mandiri
42	Jernih Jaya	Gunung Tujuh, Kab. Kerinci	Wisata buatan, kuliner, cenderamata	Mandiri
43	Lekuk 50 Tumbi	Gunung Raya, Kab. Kerinci	Wisata alam, buatan, atraksi seni, agrowisata, kuliner	Mandiri
44	Tanjung Tanah	Danau Kerinci, Kab. Kerinci	Wisata alam, sejarah, dan budaya, manuskrip/naskah tanjung	Mandiri

Tabel 2.14 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pelayanan Disbudpar Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran Tahun Ke -						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)
Kebudayaan	9.203.219.100	8.543.463.500	10.938.703.000	23.913.718.220	10.593.859.626	28.337.704.406	8.023.534.890	7.093.850.324	10.530.180.789	21.735.943.405	9.282.267.660	27.214.317.204	87,18	83,03	96,27	90,89	87,62	96,04	9.045.752.393	9.123.366.368
Pariwisata	2.282.293.900	2.942.049.500	6.704.624.000	7.473.971.805	4.439.173.500	4.109.549.777	1.830.459.996	2.760.144.567	5.834.972.392	6.463.708.318	1.430.309.300	3.738.749.974	80,20	93,82	87,03	86,48	32,22	90,98	863.497.664	1.104.201.500

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISBUDPAR PROVINSI JAMBI

Provinsi Jambi memiliki keragaman budaya dan kekayaan alam melimpah yang dapat dikembangkan menjadi komoditas/produk pariwisata yang representatif sebagai modal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. Dalam hal ini perlu adanya kajian berupa *self-assesment* terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterbitkan suatu dokumen perencanaan program kegiatan yang mendukung pengembangan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tugas yang diemban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sebagai induk instansi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi sangatlah vital.

Bahwasanya sektor kebudayaan dan pariwisata pada periode 2021~2026 termasuk prioritas pembangunan merupakan langkah yang strategis. Untuk mencapai kondisi dimana pengembangan kebudayaan dan pariwisata menjadi sektor yang diprioritaskan, maka strategi pengembangan pelayanan yang dapat diakomodir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dengan mengukur (1) Kekuatan/ *Strength*, (2) Kelemahan/ *Weakness*, (3) Peluang/ *Opportunities*, dan 4) Ancaman/ *Threats*. Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan terdapat tantangan dan peluang kepariwisataan. Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi Disbudpar Provinsi Jambi dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor kepariwisataan Jambi dijabarkan dalam analisis SWOT sebagai berikut

Tabel 2.15 Analisa SWOT dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
1. Mempunyai posisi wilayah/daerah yang strategis	1. Stagnasi pengembangan	1. Pergeseran trend kepariwisataan	1 Persaingan dengan obyek wisata sejenis

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<p>karena berada ditengah pulau Sumatera</p> <p>2. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Provinsi Jambi yang masih kental dan mengakar</p> <p>3. Keramahmatan dari masyarakat Provinsi Jambi terhadap wisatawan</p> <p>4. Mempunyai keberagaman potensi wisata, mulai dari pegunungan, pedesaan, perkotaan sampai pantai</p> <p>5. Harga yang bersaing dengan destinasi wisata yang lain</p> <p>6. Memiliki potensi alam dan budaya sebagai wisata edukasi</p> <p>7. Ditetapkannya Kerinci sebagai <i>branding</i> pariwisata Jambi</p> <p>8. Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Kerinci dan Candi Muaro Jambi)</p> <p>9. Sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)</p> <p>10. Di tetapkannya Kerinci sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</p> <p>11. Geopark Merangin sebagai Geopark Nasional dan dalam proses menuju Unesco Geopark</p>	<p>produk wisata</p> <p>2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan</p> <p>3. Rendahnya kualitas jaringan aksesibilitas dari titik simpul distribusi (kota utama) menuju lokasi daya tarik wisata)</p> <p>4. Daya saing fasilitas penunjang pariwisata untuk segmen wisatawan masih rendah</p> <p>5. Belum adanya pencitraan yang kuat yang mampu membuat mendudukkan destinasi secara lebih kompetitif di lingkungan regional maupun internasional</p> <p>6. Rendahnya lama tinggal (<i>length of stay</i>)</p> <p>7. Objek wisata yang tersebar dengan jarak yang jauh dan aksesibilitas menuju objek wisata masih rendah</p> <p>8. Promosi belum optimal</p> <p>9. Belum ada <i>direct flight</i> menuju Provinsi Jambi</p> <p>10. Identitas, image serta branding</p>	<p>dunia dari <i>leisure</i> menjadi <i>culture experience</i></p> <p>2. Keberadaan stakeholder pariwisata</p> <p>3. Ekoturisme yang semakin populer</p> <p>4. Kelompok budaya Jambi yang masih eksis</p> <p>5. Adanya perhatian nasional dan internasional terhadap beberapa objek wisata</p> <p>6. Kerinci sebagai ikon provinsi Jambi dapat dimanfaatkan sebagai pusat distribusi wisatawan</p>	<p>yang berdekatan dengan sekitar wilayah Jambi</p> <p>2. Kerawanan terhadap bencana alam</p> <p>3. Kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal dan sejarah</p> <p>4. Belum terbangunnya koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara harmonis</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, kesenian dan adat tradisi</p>

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<p>Global Network</p> <p>12. Situs percandian Muarojambi yang berkelas dunia</p> <p>13. Jambi sebagai tempat yang aman untuk dikunjungi</p> <p>14. Kerajinan dan makanan lokal yang dapat menjadi ciri khas tiap kabupaten</p>	<p>Provinsi Jambi belum terbentuk dalam benak wisatawan</p> <p>11. Pencapaian ke setiap kabupaten/kota yang jauh karena terbatasnya penerbangan ke bandara kecil yang ada di kabupaten</p> <p>12. Pengelolaan daya tarik wisata masih belum dilakukan secara profesional</p> <p>13. Masih kurangnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku pariwisata terutama untuk masyarakat disekitar daya tarik wisata serta sertifikasi bagi para pelaku wisata</p>		

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Provinsi Jambi pada tataran nasional, harus pula memperhatikan *positioning* daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Provinsi Jambi yang secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan seyogyanya memperhatikan pula perkembangan kepariwisataan dan kebudayaan di 3 (tiga) Provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Secara garis besar dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah;

a. Permasalahan Urusan Pariwisata

Pembangunan destinasi pariwisata meliputi aspek pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata. Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

- (1) Bencana alam dan pandemi,
- (2) Ketersediaan jaringan komunikasi dan infrastruktur penunjang lainnya yang belum optimal;
- (3) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;
- (4) Rendahnya minat investor yang berinvestasi di sektor pariwisata;
- (5) Legalitas lahan pertanahan pada objek wisata;
- (6) Belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif;
- (7) Strategi promosi yang belum optimal;
- (8) Event-event pariwisata daerah yang belum terintegrasi

(1) Bencana alam dan pandemi;

Bencana alam terutama disebabkan oleh tindakan manusia seperti penebangan pohon secara sembarangan, pengerukan gunung, dan tidak dirawatnya daerah tepi pantai, akan berdampak timbulnya bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, kemarau panjang, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya.

Isu bencana alam ini juga berdampak kepada perencanaan penyelenggaraan destinasi wisata. Wisatawan menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan tujuan wisata ke daerah yang sering terkena bencana alam. Hal ini akan berdampak secara langsung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung.

Daya tarik wisata di Provinsi Jambi tidak luput dari kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam. Hal ini juga akan membuat citra Jambi di mata wisatawan menjadi kurang baik karena menimbulkan rasa kurang aman dan nyaman dalam berwisata.

Pandemi Covid-19 sebagai bencana kesehatan global juga memiliki dampak yang tidak kalah besar terhadap penyelenggaraan destinasi wisata. Kenyamanan wisatawan secara tidak langsung akan terpengaruh dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah kunjungan.

Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal ini, seperti penyadaran masyarakat terhadap lingkungan, pemberian sanksi bagi perusahaan yang merusak lingkungan, menyusun strategi tanggap bencana lingkungan pada berbagai objek wisata, dan pembangunan citra Jambi sebagai Provinsi yang bebas bencana alam.

(2) Ketersediaan jaringan komunikasi dan infrastruktur penunjang lainnya yang belum optimal;

Ketidaknyamanan wisatawan dalam berwisata dan kesulitan dalam mencapai lokasi destinasi wisata merupakan masalah akibat tidak tersedianya infrastruktur yang baik. Akibat masalah jaringan komunikasi dan infrastruktur ini, dapat menimbulkan masalah lain, yaitu ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, dan keterbatasan aksesibilitas membuat jumlah wisatawan yang datang ke Jambi belum optimal. Kenyamanan wisatawan dengan melengkapi sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang aman, bersih, dan tertib merupakan hal dasar yang perlu disiapkan oleh setiap pengelola objek wisata di daerah destinasi wisata. Keterbatasan akses menuju daya tarik wisata prioritas seperti kawasan Kerinci, Geopark Merangin, Candi Muarajambi perlu pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang objek wisata tersebut.

(3) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;

Banyak daerah yang sudah dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata Provinsi Jambi, namun tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat sekitar. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata. Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi wisata. Dengan menanamkan nilai dan tujuan pariwisata Jambi dan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta fasilitasi sertifikasi profesi di setiap unsur pelayanan kepariwisataan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan sendiri daerahnya sebagai daerah destinasi Jambi yang lebih baik lagi.

(4) Rendahnya investasi di sektor pariwisata.

Provinsi Jambi pada dasarnya merupakan salah satu Provinsi tujuan investasi pariwisata yang prospektif, namun demikian peluang tersebut belum menjadi perhatian dari para investor. Hal ini perlu ditangani dengan berbagai langkah misalnya membuat proposal kerjasama investasi yang menarik perhatian dari para

investor, apalagi kini birokrasi perizinan dapat di akses secara online dan lebih transparan.

(5) Legalitas pertanahan pada objek wisata

Terhambatnya penyelenggaraan pembangunan di destinasi wisata pada umumnya didominasi legalitas pertanahan, seperti sertifikat tanah, konflik kepemilikan, dan panjangnya negoisasi pembebasan lahan di areal objek wisata. Disaat yang sama prosedur pembangunan oleh pemerintah mewajibkan status hukum yang jelas di areal yang akan dibangun.

(6) Belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif;

Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini dapat terlihat dari penetapan fokus pasar yang belum mengacu terhadap analisa pasar yang dilakukan, beberapa hal disebabkan belum adanya pembobotan terhadap variable yang menjadi penilaian dalam menentukan fokus pasar baik wisatawan mancanegara, maupun wisatawan nusantara. Penetapan target pasar wisatawan mancanegara dan nusantara harus melalui sebuah proses analisa yang mendalam dari sumber yang relevan sehingga mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.

(7) Strategi promosi yang belum optimal;

Potensi objek wisata masih belum terpromosikan secara optimal, sehingga informasi yang dimiliki tidak menjangkau calon wisatawan.

Provinsi Jambi harus memiliki suatu strategi promosi pariwisata yang efektif dan terpadu yang dapat digunakan oleh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan pariwisata Jambi dalam melakukan aktivitas pemasaran pariwisata. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut harus didukung dan dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan citra pariwisata Jambi di tingkat regional, nasional dan dunia internasional. Dengan meningkatkan kemampuan dan kesadaran untuk menyikapi trend perkembangan teknologi dan informasi strategi pemasaran akan menjadi lebih tepat sasaran yang berimbas dengan meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan ke Provinsi Jambi. Perlu identifikasi segmen pasar untuk promosi yang efektif dan efisien sehingga promosi pariwisata Jambi yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan minat dan ekspektasi calon wisatawan, diiringi dengan analisa dan evaluasi secara periodik. Strategi promosi juga harus mengikuti trend dan perkembangan pariwisata global serta menggunakan teknologi informasi terkini. Pemanfaatan media teknologi informasi dapat memberikan dampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Bahan-bahan promosi disebarkan melalui internet dalam bentuk digital selain dapat menekan biaya cetak juga tersebar lebih luas. Branding pariwisata Jambi belum merepresentasikan pencitraan dan posisi pariwisata Jambi dalam konteks nasional maupun internasional

(8) Event-event pariwisata daerah yang belum terintegrasi

Event-event yang berskala nasional dan internasional masih terbatas dikarenakan banyak daerah yang mempunyai event-event daerah yang sebenarnya menarik namun belum menetapkan kepastian waktu pelaksanaan dan belum mampu mengemas event secara profesional sehingga kemasannya kurang menarik. Konsep tematik yang menjadi favorit dikalangan wisatawan milenial juga belum dapat direalisasikan.

Event-event daerah perlu didorong untuk dapat mengemas event-eventnya agar lebih berkualitas serta sesuai dengan permintaan pasar. Dalam merancang event-event pariwisata daerah semua program-program yang dibuat harus dapat menggambarkan sebuah konsep kegiatan yang mampu menarik minat wisatawan, diperlukan suatu sinergitas antar event-event pariwisata daerah terutama dalam penentuan waktu dan tempat pelaksanaan sehingga dapat memperpanjang masa kunjungan wisatawan.

Pembuatan event berkonsep tematik atau *storynomic* merupakan pemuncak daftar event yang paling sering dikunjungi wisatawan, kedepan event-event seperti ini harus menjadi prioritas dan standar pembuatan event pariwisata daerah.

b. Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan merupakan dasar langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan

memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan. Keempat langkah tersebut saling terhubung dan tidak bisa dilaksanakan secara bertahap ataupun tidak dapat dipisahkan. Kurang optimalnya pelaksanaan urusan kebudayaan, disebabkan oleh:

(1) Kurangnya upaya perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan

Kurangnya upaya perlindungan terhadap objek kemajuan kebudayaan di Provinsi Jambi disebabkan oleh pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan, penyelamatan serta publikasi objek pemajuan kebudayaan yang tidak terpadu.

(2) Kurangnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan

Tidak optimalnya upaya-upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan menjadi penyebab kurangnya upaya pengembangan objek-objek pemajuan kebudayaan.

(3) Kurangnya pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan

Upaya-upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat tidak terlaksana dengan baik.

(4) Kurangnya pembinaan terhadap penggiat dan pelaku objek pemajuan kebudayaan

Kurangnya upaya pendidikan dan upaya pelatihan dibidang kebudayaan, tidak adanya standarisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja dibidang kebudayaan serta peningkatan tata kelola lembaga dan pranata dibidang kebudayaan menjadi penyebab tidak optimalnya upaya pembinaan terhadap penggiat aktivis dan pelaku objek kebudayaan.

(5) Permasalahan dalam penyelenggaraan bidang sejarah, purbakala dan permuseuman.

- a. Data dibidang sejarah purbakala dan permuseuman belum tersusun dan tersaji secara baik.
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang sejarah kepurbakalaan dan permuseuman belum optimal.

- c. Sumber daya manusia dibidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman belum memiliki sertifikasi dan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- d. Pengelolaan, pengawasan dan tata kelola situs-situs belum terkoordinasi antar instansi pusat dan daerah sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belum adanya museum umum dan tematik di kabupaten/kota.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Jambi yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”. RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan tahap perencanaan lima tahun keempat.

3.2.1. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026

Strategi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berisikan langkah-langkah program indikatif untuk menunjang terwujudnya visi dan misi, yang dirumuskan dengan beberapa kriteria mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan program kepala daerah terpilih; (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis; (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun; (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategis daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemementasi kebijakan sampai dengan tahun 2026, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan enam misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2021-2026, adalah:

“Terwujudnya Jambi Yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT”

Berdasarkan visi tersebut, Gubernur Jambi terpilih merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 6 agenda prioritas Pemerintah Provinsi Jambi yang disebut **JAMBI MANTAP**. Didalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Provinsi Jambi yang terkait dengan Kebudayaan dan Pariwisata, adalah agenda prioritas butir ke kedua dan ketiga.

Visi Gubernur tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambar dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka Jambi Mantap dirumuskan kedalam misi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan:** yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat** dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur 2021-2026 maka tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan misi yang terkandung dalam Jambi mantap 2026, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dalam peningkatan aktivitas ekonomi yang

berkelanjutan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mempunyai fungsi dalam peningkatan kualitas dan keragaman perekonomian masyarakat, dengan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam pencapaian visi misi Gubernur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengemban tugas dan tanggung jawab pada misi kesatu, kedua dan ketiga dari misi Jambi mantap sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan:** yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat** dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Dari ketiga misi yang menjadi tanggung jawab dapat diterjemahkan kedalam tujuan Dinas kebudayaan dan Pariwisata pertama Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran:

- o Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Tujuan kedua Dinas kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya pengelolaan, pelestarian dan perlindungan budaya dan cagar budaya dengan sasaran :

- o Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Seni dan Budaya
- o Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya
- o Meningkatnya jumlah karya budaya
- o Meningkatnya pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan

Tujuan ketiga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata daerah dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata, industri wisata dan promosi kepariwisataan
- Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif

Berdasarkan visi dan Misi Gubernur 2021-2026 maka tugas dan fungsi Dinas kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan misi yang terkandung dalam Jambi mantap 2026, dalam hal ini Dinas kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dalam peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dinas kebudayaan dan Pariwisata juga mempunyai fungsi dalam peningkatan kualitas dan keragaman perekonomian masyarakat, dengan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam pencapaian visi misi Gubernur terdapat beberapa faktor penghambat dalam urusan kebudayaan dan pariwisata yang memerlukan solusi dari berbagai pihak.

Faktor penghambat pelayanan Dinas kebudayaan dan Pariwisata yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Ketersediaan dan konektivitas infrastruktur yang belum optimal.
- (2) Stagnasi produk wisata
- (3) Perkembangan daya tarik wisata belum sepenuhnya seimbang dengan perkembangan segmentasi pasar yang semakin luas dan beragam.
- (4) Daya dukung kawasan perkotaan (keterbatasan prasarana lingkungan untuk kenyamanan pariwisata)
- (5) Daya dukung kawasan wisata (kemacetan di masa *peak season*, kawasan wisata alam/kawasan konservasi, degradasi lingkungan dan penurunan kualitas daya tarik wisata)
- (6) Daya saing produk pariwisata yang masih belum optimal
- (7) Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
- (8) SDM pariwisata dan belum adanya pendidikan tinggi pariwisata
- (9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar objek wisata terhadap nilai-nilai Sapta Pesona dan pelestarian lingkungan daya tarik wisata
- (10) Minimnya keragaman aktifitas yang dapat dilakukan wisatawan di objek wisata yang berdampak pada lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.
- (11) Kabut asap yang secara berkala melanda provinsi Jambi yang berdampak pada visibilitas bentang alam yang baik menjadi sedikit

terhalang. Kebakaran lahan dan hutan juga dapat mengancam keberlanjutan daya tarik wisata.

- (12) Jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana amenities terbatas termasuk penyediaan informasi wisata. Disamping itu pembangunan fasilitas khusus untuk kegiatan wisata baik di dalam maupun di sekitar taman wisata yang memadai dan memberikan jaminan keselamatan wisatawan masih kurang.
- (13) Dua bandara pendukung di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci sebagai alternatif untuk menuju objek wisata ke daerah tersebut belum beroperasi secara maksimal, sehingga jarak tempuh untuk menuju destinasi wisata dari ibukota provinsi masih lama.

Faktor pendorong pelayanan di Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai sebagai berikut:

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 (Renstra Kemenparekraf/ Baparekraf 2020-2024) yang memuat visi, misi, nilai-nilai, penilaian dan kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai upaya memberikan

informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kepariwisataan nasional.

Dalam dokumen Renstra tersebut dinyatakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kemenparekraf Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. VISI

Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

2. MISI

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/ Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap Misi nomor 2, yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya

saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap Misi Presiden RI nomor 1 dan 8.

Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan Misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

3. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goals*) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

- (1) Nilai devisa pariwisata;
- (2) Kontribusi PDB Pariwisata;
- (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3)

“Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”; (5) “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”; dan (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif internal process, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf/Baparekraf

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor

- ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi: (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
 6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi: (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
 7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Permasalahan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif

1. Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

- (1) *perubahan iklim dan bencana alam,*
- (2) *ketersediaan konektifitas dan infrastruktur yang belum optimal;*
- (3) *kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;*

- (4) *kemudahan investasi yang masih belum optimal.*

2. Permasalahan pengembangan industri pariwisata:

- (1) *sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;*
- (2) *daya saing produk wisata yang belum optimal;*
- (3) *kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal;*
- (4) *pengembangan tanggung jawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata masih belum optimal.*
- (5) *kesenjangan antara tingkat harga dengan pengalaman wisata*

3. Dalam pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan promosi pariwisata Indonesia belum optimal yaitu:

- (1) *belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif;*
- (2) *strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu;*
- (3) *sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal;*
- (4) *kegiatan promosi pariwisata masih berjalan parsial.*
- (5) *daya saing pariwisata Indonesia masih belum kuat.*

4. Permasalahan pengembangan Kelembagaan kepariwisataan;

- (1) *belum meratanya penguatan organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;*
- (2) *SDM pariwisata dan pengembangan pendidikan tinggi pariwisata yang terbatas;*
- (3) *koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif.*

5. Permasalahan pembangunan ekonomi kreatif;

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

- 1) *Riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas*
- 2) *Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan*
- 3) *Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan belum meluas*
- 4) *Infrastruktur baik fisik maupun TIK yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih terbatas*
- 5) *Produk ekonomi kreatif belum dikenal luas dan dikonsumsi baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri*

- 6) *Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun*
- 7) *Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas*

Faktor pendorong pembangunan pariwisata

1. Potensi pembangunan destinasi pariwisata

Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata, terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia untuk dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, antara lain:

- (1) *kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata nasional,*
- (2) *pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan destinasi,*
- (3) *Indonesia sebagai Negara tujuan investasi yang prospektif,*
- (4) *atensi dan sikap positif masyarakat terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan*

2. Potensi pembangunan industri pariwisata

- (1) *pariwisata menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam;*
- (2) *daya saing produk dan kredibilitas bisnis;*
- (3) *tanggung jawab lingkungan yang semakin tinggi.*

3. Potensi pembangunan kelembagaan kepariwisataan

- (1) *penguatan organisasi;*

Berbagai upaya pembenahan organisasi di tingkat pusat dan lokal telah dilakukan, diantaranya pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia); BPPI (Badan Promosi Pariwisata Indonesia) dan unsur di daerah dalam bentuk BPPD, pembentukan DMO (Destination Management Organization), dan sebagainya.

- (2) *SDM kepariwisataan;*

Pengembangan SDM Kepariwisata dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, baik bagi Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan pada

Industri Pariwisata maupun Masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.

Penambahan jumlah lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan. Selain itu, pelaksanaan pelatihan, penyiapan piranti pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pembekalan, workshop, sosialisasi, beserta penyiapan kurikulum dan modul pelatihan telah disiapkan sertifikasi kompetensi SDM bidang pariwisata.

(3) pariwisata sebagai kegiatan multisektor, borderless dan regulasi yang mendukung.

Pengembangan pariwisata memerlukan koordinasi dan integrasi kebijakan secara intensif untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kepariwisataan sebagai sektor andalan pembangunan nasional,

Upaya mendukung akselerasi pembangunan kepariwisataan dan koordinasi yang intensif lintas pelaku (sektoral dan regional) tersebut telah memiliki sejumlah payung hukum, antara lain melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional dan Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

4) Bonus Demografi Indonesia

Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi, yaitu kondisi pertumbuhan penduduk terutama penduduk usia produktif (15-64 tahun). Ini merupakan suatu kesempatan karena bonus demografi adalah sumber pertumbuhan ekonomi akibat adanya konsumsi yang tinggi, peningkatan investasi dan produktivitas serta penurunan angka ketergantungan. Bonus demografi selain sebagai potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi bencana demografi jika tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik.

Potensi pembangunan pemasaran pariwisata

- 1) Potensi pasar wisman dan wisnus yang terus tumbuh
- 2) Citra positif yang terbangun melalui berbagai event dan peristiwa penting
- 3) Peran Media dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Adaptif

- 4) Kemitraan Pemasaran yang Semakin Luas Dibangun di Kalangan Pelaku Pariwisata
- 5) Promosi Indonesia yang Semakin Kuat yang Terfokus dan Media Promosi yang Semakin Beragam
- 6) Brand Equity Wonderful Indonesia

Potensi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif, terdapat beberapa potensi yang dimiliki, yaitu: 1) Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi, yang mencakup kuliner, busana daerah, kriya, musik, dan seni pertunjukan. 2) Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner. 3) Bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan.

- 4) Jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik.

Hasil telaahan Renstra budpar dengan renstra kemenparekraf

Hasil telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI adalah :

- a. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah.
- b. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi; secara langsung merupakan refleksi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARPROV) Provinsi Jambi tahun 2016-2031 untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk kegiatan yang berskala internasional, nasional maupun lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi selalu bersinergi dengan Kemenparekraf RI.
- d. Jadi keberadaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RI

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Baru dengan undang-undang Nomor inilah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024.

Dalam dokumen Renstra tersebut dinyatakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2020-2024 sebagai berikut :

VISI

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional

MISI

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut yang berhubungan dengan pembangunan kebudayaan adalah misi nomor 2 (dua) yaitu:

Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra

TUJUAN

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan. Tujuan yang selaras dengan pembangunan bidang kebudayaan adalah tujuan 4 yaitu;

Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan

Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis tersebut, tujuan yang hendak diraih oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan”

SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024.

4.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020- 2024, yakni “Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa” serta “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud selama 2020-2024 akan berfokus pada sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan

Tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040

Untuk mencapai fokus tersebut, strategi utama yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan
2. Meningkatnya jumlah WBTb yang Ditetapkan

3. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU
4. Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan
5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda
6. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan mengadakan pembelajaran muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
7. Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia
8. Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan
9. Meningkatnya jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
10. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki tenaga Ahli Cagar Budaya
11. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB
12. Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan
13. Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
14. Meningkatkan jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah.
15. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya.
16. Mengembangkan wilayah adat yang menjadi ruang interaksi bersama Pemajuan Kebudayaan.
17. Meningkatkan jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan.
18. Meningkatnya jumlah pengunjung mega even kebudayaan
19. Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik
20. Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru
21. Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah
22. Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional

Faktor Penghambat Pembangunan Kebudayaan

Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah, dan (4) sistem perbukuan.

6. Kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan di Indonesia juga masih dapat ditingkatkan.

2. Nilai Pemanfaatan Ekonomi Cagar Budaya

Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan kemungkinan merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada. Taman-taman budaya yang telah direvitalisasi dan dibangun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang memajukan dan melestarikan budaya. Cagar-cagar budaya dapat pula memiliki nilai ekonomi, misalnya sebagai objek wisata, tanpa kehilangan fokusnya sebagai pelestari artefak- artefak kebudayaan. Nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang rendah kontras dengan suburnya industri kreatif di Indonesia. Seyogyanya, industri kreatif dapat bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menggali pemanfaatan ekonomi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan agar dapat terus mendukung kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain;

1. Terbatasnya sumber daya manusia dibidang kebudayaan yang berkualitas, dan belum adanya pemetaan profesi serta standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta belum optimalnya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, terutama didaerah.
2. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi dalam hal pendokumentasian sebagai bahan publikasi budaya.
4. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan.
5. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah serta kerja sama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Faktor Pendorong Pembangunan Kebudayaan

1. Faktor internal

Adanya upaya pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi, melestarikan mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan indonesia melalui berbagai program dan kegiatan, terutama penanaman rasa cinta dan bangga terhadap kebudayaan indonesia.

2. Faktor external

Faktor yang datang dari luar akibat terjadinya kontak budaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Di era informasi yang sangat terbuka dan komunikasi budaya yang tidak dapat dihindarkan, terlebih komunikasi budaya melalui teknologi komunikasi, maka budaya luar yang baik dan sesuai dengan kepriabadian serta falsafah bangsa dapat mendorong pengayaan kebudayaan bangsa Indonesia melalui proses alkuturasi budaya.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah, Provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jambi didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dimaksud harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, serta keselarasan aspirasi pembangunan provinsi

dan pembangunan kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Penataan Ruang tersebut juga menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

1. Tujuan penataan ruang Provinsi Jambi

Pengembangan Provinsi Jambi, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi Jambi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Potensi

- a. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Transit Sumatera, Bandara

Sultan Thaha dan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi Jambi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMT-GT (*Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle*). Dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.

- b. Provinsi Jambi mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi aset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
- c. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumber daya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
- d. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumber daya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri yang merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi bidang kepariwisataan; besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi (terukur/dituangkan dalam spasial) yang akan dilaksanakan, meliputi:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat-tengah dan timur.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah.
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah.
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara,

3. Rencana pola ruang wilayah Provinsi Jambi

Pola ruang merupakan kegiatan memantapkan/menetapkan, memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya yang tersedia pada ruang bersangkutan. Penetapan pola ruang ini bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika pembangunan, akan tidak berarti selalu mengarah pada perubahan fungsi suatu ruang tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung ruang yang telah ditetapkan.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyalurkan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan, maka ditetapkan arahan, pengembangan dan pengelolaan pada kawasan budidaya berdasarkan sifat kegiatan, potensi pengembangan dan kesesuaian lahan, yang berhubungan dengan kepariwisataan antarlain;

3.1. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya

b. Taman Hutan Raya

Hutan Raya adalah kawasan pelestarian untuk tujuan koleksi tumbuhan alami atau buatan. Kriteria kawasan berupa keragaman tumbuhan dengan fungsi lindung atau vegetasi

tetap dengan keragaman flora dan fauna, bentang alam dan akses yang baik untuk pariwisata. Kriteria penetapan kawasan taman hutan raya menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
- b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
- f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

c. Taman Wisata Alam

Menurut PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Kriteria taman wisata alam menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
- b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
- d. kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

Taman wisata alam di Provinsi Jambi memiliki luas kurang lebih 426 (empat ratus dua puluh enam) hektar berupa taman wisata alam Sungai Bengkal di Kabupaten Tebo.

d. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi yang bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan keagamaan, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia

Di Provinsi Jambi kawasan agar budaya berupa hutan penelitian biotrop di Kabupaten Tebo dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar.

3.2. Kawasan sesuai peruntukannya

a. Kawasan peruntukan pariwisata

Lokasi kegiatan pariwisata di Provinsi Jambi pada dasarnya dapat dikelompokkan atas dua bagian yaitu wisata budaya dan wisata alam. Kawasan wisata alam meliputi:

1. Taman Nasional Berbak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo.
3. Taman Nasional Bukit Tigapuluh terdapat di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Taman Nasional Bukit Duabelas terdapat di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun.
5. Taman Hutan Raya meliputi Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi.

b. Kawasan wisata budaya meliputi:

1. Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Kawasan cagar budaya Seberang di Kota Jambi.
3. Pemukiman tradisional Rantau Panjang di Kabupaten Merangin.
4. Situs Lubuk Ruso di Kabupaten Batanghari.
5. Makam Sultan Thaha Syaifuddin di Kabupaten Tebo.

6. Makam Rangkayo Pingai di kumpeh
7. dan makam Rangkayo Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pengembangan seperti ini merupakan rangkaian pemanfaatan potensi secara optimal dan penganeekaragaman kegiatan untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan ke Provinsi Jambi.

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata meliputi:

1. Penataan ruang kawasan pariwisata.
2. Pengembangan hasil kerajinan rakyat dan budaya masyarakat.
3. Pengembangan objek dan fasilitas pariwisata.
4. Promosi dan upaya memperkenalkan objek-objek wisata
5. Penganeekaragaman jenis wisata/atraksi wisata
6. Perbaikan jaringan jalan dan penyediaan sarana transportasi ke lokasi obyek wisata

3.3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi dalam ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UU Nomor 26 tahun 2007). Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis dan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- c. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
- f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

1. Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.
2. Kawasan pemukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.
3. Kawasan pemukiman suku duano di sabak dan tungkal

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya peningkatan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Jangkauan informasi dan promosi pariwisata - Pemetaan segmentasi pasar - kualitas event pariwisata daerah - Sinergitas pemangku kepentingan pemasaran pariwisata - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata - Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis pariwisata - sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata - Regulasi dan dokumen penunjang pengembangan kawasan - Informasi potensi pariwisata Jambi belum memadai - Tenaga profesional di industri pariwisata - Belum optimalnya penembangan industri kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi dan pemasaran produk wisata belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal - Belum adanya pemetaan segmentasi pasar - Kurangnya kerjasama pemasaran pariwisata dengan stakeholders pariwisata - Pelaksanaan event pariwisata masih berstandar lokal - Masih kurangnya aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata - Belum ada payung hukum turunan RIPPAPROV Jambi - Masih kurangnya aksesibilitas dan amenities wisata yang berkualitas - Penyusunan produk hukum bidang pariwisata - Kurang tersedianya profil investasi pariwisata daerah - Kurangnya standarisasi dan kompetensi pelayanan industri pariwisata - Model bisnis kreatif yang belum matang - Kurangnya apreasi terhadap kreatifitas lokal - Belum optimalnya pengembangan konten kreasi dan teknologi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			kreatif - Belum optimalnya pengembangan SDM ekonomi kreatif - Belum optimal Sentra-sentra yang mendukung terbentuknya kota kreatif
2	Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan	- Rendahnya SDM tata kelola destinasi wisata dan SDM kepariwisataan - Masih rendahnya SDM akan tinggalan sejarah dan purbakala - Belum adanya sertifikasi tim ahli cagar budaya - Masih rendahnya SDM permuseuman	- Masih kurangnya standarisasi SDM tata kelola dan kepariwisataan - Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap tinggalan sejarah dan purbakala - Adanya mitologi pada masyarakat terhadap tinggalan sejarah, purbakala dan budaya sehingga sulit untuk mendokumentasikan - Belum adanya sertifikasi tim ahli cagar budaya peringkat kab/ kota dan Provinsi - Belum adanya tenaga ahli konservator, kurator, prevarator dan edukator museum di daerah yang bersertifikat - Kurangnya komunitas pecinta sejarah dan literasi tentang sejarah lokal
3	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan)	- Fasilitasi perlindungan karya budaya dalam bentuk produk hukum - Sertifikasi pelaku seni - Apresiasi seniman dan budayawan (individual/ komunal) - Kurangnya ruang ekspresi bagi pelaku budaya - Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM - Kurangnya data kebudayaan	- Terbatasnya pemanfaatan ruang publik sebagai ruang ekspresi - Belum adanya sertifikasi pelaku seni - Kurangnya sarpras dan pendanaan yang dimiliki oleh pelaku seni - Kurangnya promosi pelestarian budaya - Kurangnya pembinaan pelaku seni dan kelompok seni

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Secara garis besar dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah;

c. Permasalahan Urusan Pariwisata

Pembangunan destinasi pariwisata meliputi aspek pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata. Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

- (1) Bencana alam dan pandemi,
- (2) Ketersediaan jaringan komunikasi dan infrastruktur penunjang lainnya yang belum optimal;
- (3) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;
- (4) Rendahnya minat investor yang berinvestasi di sektor pariwisata;
- (5) Legalitas lahan pertanahan pada objek wisata;
- (8) Belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif;
- (9) Strategi promosi yang belum optimal;
- (8) Event-event pariwisata daerah yang belum terintegrasi

(8) Bencana alam dan pandemi;

Bencana alam terutama disebabkan oleh tindakan manusia seperti penebangan pohon secara sembarangan, pengerukan gunung, dan tidak dirawatnya daerah tepi pantai, akan berdampak timbulnya bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, kemarau panjang, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya.

Isu bencana alam ini juga berdampak kepada perencanaan penyelenggaraan destinasi wisata. Wisatawan menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan tujuan wisata ke daerah yang sering terkena bencana alam. Hal ini akan berdampak secara langsung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung.

Daya tarik wisata di Provinsi Jambi tidak luput dari kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam. Hal ini juga akan membuat citra Jambi di mata wisatawan menjadi kurang baik karena menimbulkan rasa kurang aman dan nyaman dalam berwisata.

Pandemi Covid-19 sebagai bencana kesehatan global juga memiliki dampak yang tidak kalah besar terhadap penyelenggaraan destinasi wisata. Kenyamanan wisatawan secara tidak langsung akan terpengaruh dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah kunjungan.

Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal ini, seperti penyadaran masyarakat terhadap lingkungan, pemberian sanksi bagi perusahaan yang merusak lingkungan, menyusun strategi tanggap bencana lingkungan pada berbagai objek wisata, dan pembangunan citra Jambi sebagai Provinsi yang bebas bencana alam.

(9) Ketersediaan jaringan komunikasi dan infrastruktur penunjang lainnya yang belum optimal;

Ketidaknyamanan wisatawan dalam berwisata dan kesulitan dalam mencapai lokasi destinasi wisata merupakan masalah akibat tidak tersedianya infrastruktur yang baik. Akibat masalah jaringan komunikasi dan infrastruktur ini, dapat menimbulkan masalah lain, yaitu ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, dan keterbatasan aksesibilitas membuat jumlah wisatawan yang datang ke Jambi belum optimal. Kenyamanan wisatawan dengan melengkapi sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang aman, bersih, dan tertib merupakan hal dasar yang perlu disiapkan oleh setiap pengelola objek wisata di daerah destinasi wisata. Keterbatasan akses menuju daya tarik wisata prioritas seperti kawasan Kerinci, Geopark Merangin, Candi Muarajambi perlu pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang objek wisata tersebut.

(10) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;

Banyak daerah yang sudah dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata Provinsi Jambi, namun tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat sekitar. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata. Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi wisata. Dengan menanamkan nilai dan tujuan pariwisata Jambi dan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta fasilitasi sertifikasi profesi di setiap unsur pelayanan kepariwisataan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan sendiri daerahnya sebagai daerah destinasi Jambi yang lebih baik lagi.

(11) Rendahnya investasi di sektor pariwisata.

Provinsi Jambi pada dasarnya merupakan salah satu Provinsi tujuan investasi pariwisata yang prospektif, namun demikian peluang tersebut belum menjadi perhatian dari para investor. Hal ini perlu ditangani dengan berbagai langkah misalnya membuat proposal kerjasama investasi yang menarik perhatian dari para investor, apalagi kini birokrasi perizinan dapat di akses secara online dan lebih transparan.

(12) Legalitas pertanahan pada objek wisata

Terhambatnya penyelenggaraan pembangunan di destinasi wisata pada umumnya didominasi legalitas pertanahan, seperti sertifikat tanah, konflik kepemilikan, dan panjangnya negoisasi pembebasan lahan di areal objek wisata. Disaat yang sama prosedur pembangunan oleh pemerintah mewajibkan status hukum yang jelas di areal yang akan dibangun.

(13)Belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif;

Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini dapat terlihat dari penetapan fokus pasar yang belum mengacu terhadap analisa pasar yang dilakukan, beberapa hal disebabkan belum adanya pembobotan terhadap variable yang menjadi penilaian dalam menentukan fokus pasar baik wisatawan mancanegara, maupun wisatawan nusantara. Penetapan target pasar wisatawan mancanegara dan nusantara harus melalui sebuah proses analisa yang mendalam dari sumber yang relevan sehingga mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.

(14) Strategi promosi yang belum optimal;

Potensi objek wisata masih belum terpromosikan secara optimal, sehingga informasi yang dimiliki tidak menjangkau calon wisatawan.

Provinsi Jambi harus memiliki suatu strategi promosi pariwisata yang efektif dan terpadu yang dapat digunakan oleh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan pariwisata Jambi dalam melakukan aktivitas pemasaran pariwisata. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut harus

didukung dan dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan citra pariwisata Jambi di tingkat regional, nasional dan dunia internasional. Dengan meningkatkan kemampuan dan kesadaran untuk menyikapi trend perkembangan teknologi dan informasi strategi pemasaran akan menjadi lebih tepat sasaran yang berimbas dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. Perlu identifikasi segmen pasar untuk promosi yang efektif dan efisien sehingga promosi pariwisata Jambi yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan minat dan ekspektasi calon wisatawan, diiringi dengan analisa dan evaluasi secara periodik. Strategi promosi juga harus mengikuti trend dan perkembangan pariwisata global serta menggunakan teknologi informasi terkini. Pemanfaatan media teknologi informasi dapat memberikan dampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Bahan-bahan promosi disebarluaskan melalui internet dalam bentuk digital selain dapat menekan biaya cetak juga tersebar lebih luas. Branding pariwisata Jambi belum merepresentasikan pencitraan dan posisi pariwisata Jambi dalam konteks nasional maupun internasional

(8) Event-event pariwisata daerah yang belum terintegrasi

Event-event yang berskala nasional dan internasional masih terbatas dikarenakan banyak daerah yang mempunyai event-event daerah yang sebenarnya menarik namun belum menetapkan kepastian waktu pelaksanaan dan belum mampu mengemas event secara profesional sehingga kemasannya kurang menarik. Konsep tematik yang menjadi favorit dikalangan wisatawan milenial juga belum dapat direalisasikan.

Event-event daerah perlu didorong untuk dapat mengemas event-eventnya agar lebih berkualitas serta sesuai dengan permintaan pasar. Dalam merancang event-event pariwisata daerah semua program-program yang dibuat harus dapat menggambarkan sebuah konsep kegiatan yang mampu menarik minat wisatawan, diperlukan suatu sinergitas antar event-event pariwisata daerah terutama dalam penentuan waktu dan tempat pelaksanaan sehingga dapat memperpanjang masa kunjungan wisatawan.

Pembuatan event berkonsep tematik atau *storynomic* merupakan pemuncak daftar event yang paling sering dikunjungi wisatawan,

kedepan event-event seperti ini harus menjadi prioritas dan standar pembuatan event pariwisata daerah.

d. Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan merupakan dasar langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan. Keempat langkah tersebut saling terhubung dan tidak bisa dilaksanakan secara bertahap ataupun tidak dapat dipisahkan. Kurang optimalnya pelaksanaan urusan kebudayaan, disebabkan oleh:

(6) Kurangnya upaya perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan

Kurangnya upaya perlindungan terhadap objek kemajuan kebudayaan di Provinsi Jambi disebabkan oleh pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan, penyelamatan serta publikasi objek pemajuan kebudayaan yang tidak terpadu.

(7) Kurangnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan

Tidak optimalnya upaya-upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan menjadi penyebab kurangnya upaya pengembangan objek-objek pemajuan kebudayaan.

(8) Kurangnya pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan

Upaya-upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat tidak terlaksana dengan baik.

(9) Kurangnya pembinaan terhadap penggiat dan pelaku objek pemajuan kebudayaan

Kurangnya upaya pendidikan dan upaya pelatihan dibidang kebudayaan, tidak adanya standarisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja dibidang kebudayaan serta peningkatan tata kelola lembaga dan pranata dibidang kebudayaan menjadi penyebab tidak optimalnya upaya pembinaan terhadap penggiat aktivis dan pelaku objek kebudayaan.

(10) Permasalahan dalam penyelenggaraan bidang sejarah, purbakala dan permuseuman.

- f. Data dibidang sejarah purbakala dan permuseuman belum tersusun dan tersaji secara baik.
- g. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang sejarah kepurbakalaan dan permuseuman belum optimal.
- h. Sumber daya manusia dibidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman belum memiliki sertifikasi dan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- i. Pengelolaan, pengawasan dan tata kelola situs-situs belum terkoordinasi antar instansi pusat dan daerah sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Belum adanya museum umum dan tematik di kabupaten/kota.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Jambi yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”. RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan tahap perencanaan lima tahun keempat.

3.2.1. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026

Strategi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berisikan langkah-langkah program indikatif untuk menunjang terwujudnya visi dan misi, yang dirumuskan dengan beberapa kriteria mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan program kepala daerah terpilih; (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis; (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun; (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategis daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi impelementasi kebijakan sampai dengan tahun 2026, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan enam misi

yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2021-2026, adalah:

“Terwujudnya Jambi Yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT”

Berdasarkan visi tersebut, Gubernur Jambi terpilih merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 6 agenda prioritas Pemerintah Provinsi Jambi yang disebut **JAMBI MANTAP**. Didalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Provinsi Jambi yang terkait dengan Kebudayaan dan Pariwisata, adalah agenda prioritas butir ke kedua dan ketiga.

Visi Gubernur tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka Jambi Mantap dirumuskan kedalam misi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan:** yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-goverment* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat** dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya

saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur 2021-2026 maka tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan misi yang terkandung dalam Jambi mantap 2026, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dalam peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mempunyai fungsi dalam peningkatan kualitas dan keragaman perekonomian masyarakat, dengan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam pencapaian visi misi Gubernur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengemban tugas dan tanggung jawab pada misi kesatu, kedua dan ketiga dari misi Jambi mantap sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan:** yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat** dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Dari ketiga misi yang menjadi tanggung jawab dapat diterjemahkan kedalam tujuan Dinas kebudayaan dan Pariwisata pertama Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran:

- o Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Tujuan kedua Dinas kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya pengelolaan, pelestarian dan perlindungan budaya dan cagar budaya dengan sasaran :

- o Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Seni dan Budaya
- o Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya

- Meningkatnya jumlah karya budaya
- Meningkatnya pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan

Tujuan ketiga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata daerah dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata, industri wisata dan promosi kepariwisataan
- Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif

Berdasarkan visi dan Misi Gubernur 2021-2026 maka tugas dan fungsi Dinas kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan misi yang terkandung dalam Jambi mantap 2026, dalam hal ini Dinas kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dalam peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dinas kebudayaan dan Pariwisata juga mempunyai fungsi dalam peningkatan kualitas dan keragaman perekonomian masyarakat, dengan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam pencapaian visi misi Gubernur terdapat beberapa faktor penghambat dalam urusan kebudayaan dan pariwisata yang memerlukan solusi dari berbagai pihak.

Faktor penghambat pelayanan Dinas kebudayaan dan Pariwisata yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Ketersediaan dan konektivitas infrastruktur yang belum optimal.
- (2) Stagnasi produk wisata
- (3) Perkembangan daya tarik wisata belum sepenuhnya seimbang dengan perkembangan segmentasi pasar yang semakin luas dan beragam.
- (4) Daya dukung kawasan perkotaan (keterbatasan prasarana lingkungan untuk kenyamanan pariwisata)
- (5) Daya dukung kawasan wisata (kemacetan di masa *peak season*, kawasan wisata alam/kawasan konservasi, degradasi lingkungan dan penurunan kualitas daya tarik wisata)
- (6) Daya saing produk pariwisata yang masih belum optimal
- (7) Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
- (8) SDM pariwisata dan belum adanya pendidikan tinggi pariwisata
- (9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar objek wisata terhadap nilai-nilai Sapta Pesona dan pelestarian lingkungan daya tarik wisata

- (10) Minimnya keragaman aktifitas yang dapat dilakukan wisatawan di objek wisata yang berdampak pada lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.
- (11) Kabut asap yang secara berkala melanda provinsi Jambi yang berdampak pada visibilitas bentang alam yang baik menjadi sedikit terhalang. Kebakaran lahan dan hutan juga dapat mengancam keberlanjutan daya tarik wisata.
- (12) Jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana amenities terbatas termasuk penyediaan informasi wisata. Disamping itu pembangunan fasilitas khusus untuk kegiatan wisata baik di dalam maupun di sekitar taman wisata yang memadai dan memberikan jaminan keselamatan wisatawan masih kurang.
- (13) Dua bandara pendukung di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci sebagai alternatif untuk menuju objek wisata ke daerah tersebut belum beroperasi secara maksimal, sehingga jarak tempuh untuk menuju destinasi wisata dari ibukota provinsi masih lama.

Faktor pendorong pelayanan di Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai sebagai berikut:

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 (Renstra Kemenparekraf/ Baparekraf 2020-2024) yang memuat visi, misi, nilai-nilai, penilaian dan kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kepariwisataan nasional.

Dalam dokumen Renstra tersebut dinyatakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kemenparekraf Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

5. VISI

Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

6. MISI

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

(9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/ Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap Misi nomor 2, yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap Misi Presiden RI nomor 1 dan 8.

Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan Misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

7. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goals*) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

- (1) Nilai devisa pariwisata;
- (2) Kontribusi PDB Pariwisata;
- (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

8. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”; (5) “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”; dan (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif internal process, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf/Baparekraf

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d)

Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi: (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi: (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Permasalahan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif

1. Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

- (1) perubahan iklim dan bencana alam,
- (2) ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal;
- (3) kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;
- (4) kemudahan investasi yang masih belum optimal.

2. Permasalahan pengembangan industri pariwisata:

- (1) sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
- (2) daya saing produk wisata yang belum optimal;
- (3) kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal;
- (4) pengembangan tanggung jawab lingkungan oleh kalangan usaha pariwisata masih belum optimal.
- (5) kesenjangan antara tingkat harga dengan pengalaman wisata

3. Dalam pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan promosi pariwisata Indonesia belum optimal yaitu:

- (1) belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif;
- (2) strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu;
- (3) sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal;
- (4) kegiatan promosi pariwisata masih berjalan parsial.
- (5) daya saing pariwisata Indonesia masih belum kuat.

4. Permasalahan pengembangan Kelembagaan kepariwisataan;

- (1) belum meratanya penguatan organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;
- (2) SDM pariwisata dan pengembangan pendidikan tinggi pariwisata yang terbatas;
- (3) koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif.

5. Permasalahan pembangunan ekonomi kreatif;

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

- 2) Riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas

- 2) *Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan*
- 3) *Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan belum meluas*
- 4) *Infrastruktur baik fisik maupun TIK yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih terbatas*
- 5) *Produk ekonomi kreatif belum dikenal luas dan dikonsumsi baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri*
- 6) *Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun*
- 7) *Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas*

Faktor pendorong pembangunan pariwisata

4. Potensi pembangunan destinasi pariwisata

Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata, terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia untuk dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, antara lain:

- (1) *kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata nasional,*
- (2) *pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan destinasi,*
- (3) *Indonesia sebagai Negara tujuan investasi yang prospektif,*
- (4) *atensi dan sikap positif masyarakat terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan*

5. Potensi pembangunan industri pariwisata

- (1) *pariwisata menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam;*
- (2) *daya saing produk dan kredibilitas bisnis;*
- (3) *tanggung jawab lingkungan yang semakin tinggi.*

6. Potensi pembangunan kelembagaan kepariwisataan

- (1) *penguatan organisasi;*

Berbagai upaya pembenahan organisasi di tingkat pusat dan lokal telah dilakukan, diantaranya pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia); BPPI (Badan Promosi Pariwisata Indonesia) dan unsur di daerah dalam bentuk BPPD,

pembentukan DMO (Destination Management Organization), dan sebagainya.

(2) *SDM kepariwisataan;*

Pengembangan SDM Kepariwisata dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, baik bagi Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan pada Industri Pariwisata maupun Masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.

Penambahan jumlah lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan Selain itu, pelaksanaan pelatihan, penyiapan piranti pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pembekalan, workshop, sosialisasi, beserta penyiapan kurikulum dan modul pelatihan telah disiapkan sertifikasi kompetensi SDM bidang pariwisata.

(3) *pariwisata sebagai kegiatan multisektor, borderless dan regulasi yang mendukung.*

Pengembangan pariwisata memerlukan koordinasi dan integrasi kebijakan secara intensif untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kepariwisataan sebagai sektor andalan pembangunan nasional,

Upaya mendukung akselerasi pembangunan kepariwisataan dan koordinasi yang intensif lintas pelaku (sektoral dan regional) tersebut telah memiliki sejumlah payung hukum, antara lain melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional dan Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

4) *Bonus Demografi Indonesia*

Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi, yaitu kondisi pertumbuhan penduduk terutama penduduk usia produktif (15-64 tahun). Ini merupakan suatu kesempatan karena bonus demografi adalah sumber pertumbuhan ekonomi akibat adanya konsumsi yang tinggi, peningkatan investasi dan produktivitas serta penurunan angka ketergantungan. Bonus demografi selain sebagai potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi bencana demografi jika tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik.

Potensi pembangunan pemasaran pariwisata

- 1) Potensi pasar wisman dan wisnus yang terus tumbuh
- 2) Citra positif yang terbangun melalui berbagai event dan peristiwa penting
- 3) Peran Media dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Adaptif
- 4) Kemitraan Pemasaran yang Semakin Luas Dibangun di Kalangan Pelaku Pariwisata
- 5) Promosi Indonesia yang Semakin Kuat yang Terfokus dan Media Promosi yang Semakin Beragam
- 6) Brand Equity Wonderful Indonesia

Potensi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif, terdapat beberapa potensi yang dimiliki, yaitu: 1) Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi, yang mencakup kuliner, busana daerah, kriya, musik, dan seni pertunjukan. 2) Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner. 3) Bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan.

- 4) Jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik.

Hasil telaahan Renstra budpar dengan renstra kemenparekraf

Hasil telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI adalah :

- a. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah.
- b. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi; secara langsung merupakan refleksi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARPROV) Provinsi Jambi tahun 2016-2031 untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk kegiatan yang berskala internasional, nasional maupun lokal, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi selalu bersinergi dengan Kemenparekraf RI.

- d. Jadi keberadaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Baru dengan undang-undang Nomor inilah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024.

Dalam dokumen Renstra tersebut dinyatakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2020-2024 sebagai berikut :

VISI

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen

pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional

MISI

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut yang berhubungan dengan pembangunan kebudayaan adalah misi nomor 2 (dua) yaitu:

Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra

TUJUAN

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan. Tujuan yang selaras dengan pembangunan bidang kebudayaan adalah tujuan 4 yaitu;

Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan

Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis tersebut, tujuan yang hendak diraih oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan”

SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024.

4.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020- 2024, yakni “Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa” serta “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud selama 2020-2024 akan berfokus pada sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan

Tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi

Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040

Untuk mencapai fokus tersebut, strategi utama yang diterapkan adalah sebagai berikut:

23. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan
24. Meningkatnya jumlah WBTb yang Ditetapkan
25. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU
26. Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan
27. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda
28. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan mengadakan pembelajaran muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
29. Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia
30. Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan
31. Meningkatnya jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
32. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki tenaga Ahli Cagar Budaya
33. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB
34. Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan
35. Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
36. Meningkatkan jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah.
37. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya.
38. Mengembangkan wilayah adat yang menjadi ruang interaksi bersama Pemajuan Kebudayaan.
39. Meningkatkan jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan.
40. Meningkatnya jumlah pengunjung mega even kebudayaan
41. Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik
42. Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru

43. Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah
44. Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional

Faktor Penghambat Pembangunan Kebudayaan

Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah, dan (4) sistem perbukuan.

7. Kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan di Indonesia juga masih dapat ditingkatkan.
2. Nilai Pemanfaatan Ekonomi Cagar Budaya

Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan kemungkinan merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada. Taman-taman budaya yang telah direvitalisasi dan dibangun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang memajukan dan melestarikan budaya. Cagar-cagar budaya dapat pula memiliki nilai ekonomi, misalnya sebagai objek wisata, tanpa kehilangan fokusnya sebagai pelestari artefak- artefak kebudayaan. Nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang rendah kontras dengan suburnya industri kreatif di Indonesia. Seyogyanya, industri kreatif dapat bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menggali pemanfaatan ekonomi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan agar dapat terus mendukung kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain;

6. Terbatasnya sumber daya manusia dibidang kebudayaan yang berkualitas, dan belum adanya pemetaan profesi serta standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta belum optimalnya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan

keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, terutama di daerah.

7. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi dalam hal pendokumentasian sebagai bahan publikasi budaya.
9. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan.
10. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah serta kerja sama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Faktor Pendorong Pembangunan Kebudayaan

3. Faktor internal

Adanya upaya pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi, melestarikan mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan indonesia melalui berbagai program dan kegiatan, terutama penanaman rasa cinta dan bangga terhadap kebudayaan indonesia.

4. Faktor external

Faktor yang datang dari luar akibat terjadinya kontak budaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Di era informasi yang sangat terbuka dan komunikasi budaya yang tidak dapat dihindarkan, terlebih komunikasi budaya melalui teknologi komunikasi, maka budaya luar yang baik dan sesuai dengan kepribadian serta falsafah bangsa dapat mendorong pengayaan kebudayaan bangsa Indonesia melalui proses akulturasi budaya.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah, Provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jambi didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dimaksud harus

memperhatikan beberapa hal diantaranya: perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, serta keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Penataan Ruang tersebut juga menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

6. Tujuan penataan ruang Provinsi Jambi

Pengembangan Provinsi Jambi, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi Jambi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Potensi

- a. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi secara geogroffis mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Transit Sumatera, Bandara Sultan Thaha dan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi Jambi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMT-GT (*Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle*). Dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.
- b. Provinsi Jambi mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi aset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
- c. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumber daya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
- d. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumber daya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri yang merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi bidang kepariwisataan; besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

7. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi (terukur/dituangkan dalam spasial) yang akan dilaksanakan, meliputi:

7. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat-tengah dan timur.
8. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah.
9. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
10. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah.
11. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan.
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara,

8. Rencana pola ruang wilayah Provinsi Jambi

Pola ruang merupakan kegiatan memantapkan/menetapkan, memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya yang tersedia pada ruang bersangkutan. Penetapan pola ruang ini bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika pembangunan, akan tidak berarti selalu mengarah pada perubahan fungsi suatu ruang tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung ruang yang telah ditetapkan.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyalurkan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan, maka ditetapkan arahan, pengembangan dan pengelolaan pada kawasan budidaya berdasarkan sifat kegiatan, potensi pengembangan dan kesesuaian lahan, yang berhubungan dengan kepariwisataan antarlain;

3.1. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya

e. Taman Hutan Raya

Hutan Raya adalah kawasan pelestarian untuk tujuan koleksi tumbuhan alami atau buatan. Kriteria kawasan berupa keragaman tumbuhan dengan fungsi lindung atau vegetasi tetap dengan keragaman flora dan fauna, bentang alam dan akses yang baik untuk pariwisata. Kriteria penetapan kawasan taman hutan raya menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
- g. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- h. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- i. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- j. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
- k. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

f. Taman Wisata Alam

Menurut PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Kriteria taman wisata alam menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
- b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
- d. kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

Taman wisata alam di Provinsi Jambi memiliki luas kurang lebih 426 (empat ratus dua puluh enam) hektar berupa taman wisata alam Sungai Bengkal di Kabupaten Tebo.

g. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi yang bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan keagamaan, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia

Di Provinsi Jambi kawasan agar budaya berupa hutan penelitian biotrop di Kabupaten Tebo dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar.

3.2. Kawasan sesuai peruntukannya

c. Kawasan peruntukan pariwisata

Lokasi kegiatan pariwisata di Provinsi Jambi pada dasarnya dapat dikelompokkan atas dua bagian yaitu wisata budaya dan wisata alam. Kawasan wisata alam meliputi:

1. Taman Nasional Berbak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo.
3. Taman Nasional Bukit Tigapuluh terdapat di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Taman Nasional Bukit Duabelas terdapat di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun.
5. Taman Hutan Raya meliputi Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi.

d. Kawasan wisata budaya meliputi:

1. Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Kawasan cagar budaya Seberang di Kota Jambi.

3. Pemukiman tradisional Rantau Panjang di Kabupaten Merangin.
4. Situs Lubuk Ruso di Kabupaten Batanghari.
5. Makam Sultan Thaha Syaifuddin di Kabupaten Tebo.
6. Makam Rangkayo Pingai di kumpeh
7. dan makam Rangkayo Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pengembangan seperti ini merupakan rangkaian pemanfaatan potensi secara optimal dan penganeekaragaman kegiatan untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan ke Provinsi Jambi.

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata meliputi:

7. Penataan ruang kawasan pariwisata.
8. Pengembangan hasil kerajinan rakyat dan budaya masyarakat.
9. Pengembangan objek dan fasilitas pariwisata.
10. Promosi dan upaya memperkenalkan objek-objek wisata
11. Penganeekaragaman jenis wisata/atraksi wisata
12. Perbaikan jaringan jalan dan penyediaan sarana transportasi ke lokasi obyek wisata

3.3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi dalam ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UU Nomor 26 tahun 2007). Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis dan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- g. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- h. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;

- i. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- j. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- k. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
- l. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

4. Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.
5. Kawasan pemukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.
6. Kawasan pemukiman suku duano di sabak dan tungkal

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya peningkatan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Jangkauan informasi dan promosi pariwisata - Pemetaan segmentasi pasar - kualitas event pariwisata daerah - Sinergitas pemangku kepentingan pemasaran pariwisata - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata - Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis pariwisata - sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata - Regulasi dan dokumen penunjang pengembangan kawasan - Informasi potensi pariwisata Jambi belum memadai - Tenaga profesional di 	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi dan pemasaran produk wisata belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal - Belum adanya pemetaan segmentasi pasar - Kurangnya kerjasama pemasaran pariwisata dengan stakeholders pariwisata - Pelaksanaan event pariwisata masih berstandar lokal - Masih kurangnya aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata - Belum ada payung hukum turunan RIPPAPROV Jambi - Masih kurangnya aksesibilitas dan amenities wisata yang berkualitas - Penyusunan produk hukum bidang pariwisata - Kurang tersedianya profil investasi pariwisata daerah - Kurangnya standarisasi dan kompetensi pelayanan industri pariwisata

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		industri pariwisata - Belum optimalnya penembangan industri kreatif	- Model bisnis kreatif yang belum matang - Kurangnya apreasi terhadap kreatifitas lokal - Belum optimalnya pengembangan konten kreasi dan teknologi kreatif - Belum optimalnya pengembangan SDM ekonomi kreatif - Belum optimal Sentra-sentra yang mendukung terbentuknya kota kreatif
2	Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan	- Rendahnya SDM tata kelola destinasi wisata dan SDM kepariwisataan - Masih rendahnya SDM akan tinggalan sejarah dan purbakala - Belum adanya sertifikasi tim ahli cagar budaya - Masih rendahnya SDM permuseuman	- Masih kurangnya standarisasi SDM tata kelola dan kepariwisataan - Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap tinggalan sejarah dan purbakala - Adanya mitologi pada masyarakat terhadap tinggalan sejarah, purbakala dan budaya sehingga sulit untuk mendokumentasikan - Belum adanya sertifikasi tim ahli cagar budaya peringkat kab/ kota dan Provinsi - Belum adanya tenaga ahli konservator, kurator, prevarator dan edukator museum di daerah yang bersertifikat - Kurangnya komunitas pecinta sejarah dan literasi tentang sejarah lokal
3	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan)	- Fasilitasi perlindungan karya budaya dalam bentuk produk hukum - Sertifikasi pelaku seni - Apresiasi seniman dan budayawan (individual/ komunal) - Kurangnya ruang ekspresi bagi pelaku budaya - Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM - Kurangnya data kebudayaan	- Terbatasnya pemanfaatan ruang publik sebagai ruang ekspresi - Belum adanya sertifikasi pelaku seni - Kurangnya sarpras dan pendanaan yang dimiliki oleh pelaku seni - Kurangnya promosi pelestarian budaya - Kurangnya pembinaan pelaku seni dan kelompok seni

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan proses sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1.1 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian Visi dan melaksanakan Misi pembangunan pariwisata Provinsi Jambi dan mengacu dengan arahan teknis operasional dokumen RPJMD 2021 - 2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi adalah;

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatnya pengelolaan, pelestarian dan perlindungan budaya dan cagar budaya.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata daerah

4.1.2 SASARAN

Dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2021–2026. Setiap sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi memiliki indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya sebagai ukuran kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2021 -2026, yang akan dipaparkan pada tabel IV. 1. berikut;

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	S A S A R A N	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi awal (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
							1	2	3	4	5
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,52	82,33	83,97	85,64	87,35	89,09
				Nilai AKIP	nilai	B	B	BB	BB	BB	A
2	Meningkatnya pengelolaan, pelestarian dan perlindungan budaya dan cagar budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Seni dan Budaya	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	%	1,02	17	18	19	20	21
			Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya	Jumlah benda bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang ditetapkan	buah	0	1	2	3	4	5
			Meningkatnya jumlah karya budaya	Jumlah karya budaya	karya	464	509	542	575	608	644

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	S A S A R A N	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi awal (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
							1	2	3	4	5
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10
			Meningkatnya pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan	Persentase peningkatan pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan	% (apresian)	61.882	16 (71.882)	20 (86.882)	23 (106.882)	28 (136.882)	36 (186.882)
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata daerah	Persentase Peningkatkan PDRB sektor Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata, industri wisata dan promosi kepariwisataan	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	orang	895.528	950.000	1.500.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000
			Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Nilai tambah ekonomi kreatif	Juta	284	350	450	550	650	750

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata tahun 2022-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi, tema, dan identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, dan efisien dalam pendanaan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana langkah-langkah operasionalnya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dibuat secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang, secara lengkap tersebut pada dari Tabel 5.1. berikut ini.

5.1. STRATEGI

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis kurun waktu tahun 2022 – 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengembangkan Kerangka Strategi makro yang akan menjadi landasan dalam perumusan fokus strategi dan program dari masing-masing bidang dan Unit Kerja didalam struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Kerangka strategi yang dimaksud meliputi sebagaimana tergambar dibawah ini;

1. Pengembangan objek pariwisata unggulan dengan melakukan revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
2. Pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA (Sengeti-Tungkal-Sabak) melalui pembangunan pusat wisata pesisir pantai bertaraf internasional.
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan perekonomian daerah sektor pariwisata melalui fasilitasi pengembangan kawasan gentala arasy, mendorong percepatan pembangunan kawasan pariwisata dan budaya percandian Muaro Jambi, dan mendorong percepatan pengembangan kawasan Geopark Merangin.
4. Peningkatan peran sektor pariwisata serta IKM pendukung melalui program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

5. Penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional disetiap kabupaten/kota setiap tahunnya.
6. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. Pemanfaatan kemajuan teknologi dan pembangunan digitalisasi produk kebudayaan, pemasaran produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keragaman budaya yang berorientasi kepada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya daerah
10. Peningkatan ketahanan budaya lokal yang multi kultur menjadi bagian semua aspek kehidupan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman
11. Peningkatan apresiasi masyarakat daerah, nasional dan internasional melalui peningkatan kunjungan ke Museum.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai sasaran strategis kurun waktu tahun 2021-2026 adalah (1) Meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah melalui pengembangan pemasaran, destinasi dan ekonomi kreatif dan (2) Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni budaya daerah dengan didukung kegiatan-kegiatan berikut ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT		
MISI 1	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

			Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

MISI 2		Memantapkan Perekonomian Masyarakat	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata, industri wisata dan promosi kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
			Penetapan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi
			Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			Penetapan Kawasan Strategis

			Pariwisata Provinsi
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pengelolaan Investasi Pariwisata
			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
			Fasilitasi Standarisasi, industri dan usaha pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
			Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

		PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Riset
			Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

MISI 3	Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia
---------------	--

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pengelolaan, pelestarian dan perlindungan budaya dan cagar budaya	Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
			Penetapan Cagar Budaya
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
	Meningkatnya pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM	Pengelolaan Museum Provinsi
			Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
			Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Siginjai, MPRJ dan Gentala Arasy
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman

	Meningkatnya pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan		Budaya
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya jumlah karya budaya		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
	Meningkatnya pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya manusia Kesenian Tradisional
			Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Indikasi rencana program kegiatan dan kebutuhan dana indikatif periode 2021~2026 ditampilkan pada tabel berikut.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Renstra 2021-2026 seperti yang diuraikan dalam tabel berikut ini.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Jumlah program dalam Renstra Tahun 2021-2026 sebanyak 6 (enam) program untuk melaksanakan fungsi kebudayaan, 2 (dua) program untuk melaksanakan fungsi pariwisata dan 2 (dua) program untuk melaksanakan fungsi ekonomi kreatif.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Jumlah kegiatan masing-masing program cukup bervariasi. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum dalam Tabel 6.1. sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2021 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81.52	82.33	83.97	85.64	87.35
2	Nilai AKIP	nilai	B	B	BB	BB	BB
3	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	%	1.02	17	18	19	20
4	Jumlah benda bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang ditetapkan	buah	0	1	2	3	4
5	Jumlah karya budaya	karya	464	509	542	575	608
6	Persentase peningkatan pengunjung/ apresiasi objek pemajuan kebudayaan	% (apresian)	61.882	16 (71.882)	20 (86.882)	23 (106.882)	28 (136.882)
7	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	Orang	895.528	950.000	1.500.000	2.000.000	2.100.000
8	Nilai tambah ekonomi kreatif	Juta	284	350	450	550	650

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disbudpar Provinsi Jambi. Dalam proses penyusunannya berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Renstra Disbudpar Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar bagi perumusan visi, misi, kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 ini, maka setiap bidang dan unit kerja dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan memiliki acuan dan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kegiatan Disbudpar tahun 2022-2026, dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini, tentunya dapat diwujudkan dengan melakukan koordinasi yang baik dan intensif secara internal antar bidang dan unit kerja, maupun

secara eksternal dengan lembaga/instansi terkait, kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat melalui kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dukungan DPRD Provinsi Jambi dan kabupaten/kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta (*stakeholder*), LSM, dan masyarakat.

Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dalam lima tahun mendatang pada bidang kebudayaan dan pariwisata. Terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau di pandang strategis dalam lingkup yang lebih luas dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kiranya Renstra Tahun 2021-2026 ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan Renstra ini.

KEPALA DINAS

Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19730624 199403 1 003